



KATALOG BPS : 3101013.12

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN 2010 DAN ANALISIS DATA
PENGANGGURAN SEMESTER I TAHUN 2011
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Istana Maimun di Waktu Malam



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN 2010 DAN ANALISIS DATA PENGANGGURAN SEMESTER I TAHUN 2011 PROVINSI SUMATERA UTARA

Katalog BPS : 3101013.12
Nomor Publikasi : 12520.1101

Ukuran Buku : 27,94 cm x 21,59 cm
Jumlah Halaman : vi + 66

Naskah :

Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Tim Penyusun Naskah :

- Penanggungjawab : Drs. Suharno, M.Sc.
- Editor : Ir. Sukardi, MSi.
- Koordinator : Dadan Supriadi
- Anggota : Azantaro
Kurnia

Gambar & Kulit :

Bidang Statistik Sosial
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

Sumber Dana :

APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2011

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara
Jalan Kaptem Muslim No.71 Medan 20123

☎ (061) 8452343 Fax. (061) 8452773

Home Page : <http://sumut.bps.go.id/> Email : bps1200@bps.go.id

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010 dan Analisis Data Pengangguran Semester I Tahun 2011 di Sumatera Utara.

Dalam publikasi ini disajikan indikator-indikator yang menggambarkan kondisi kesejahteraan rakyat yang mencakup aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, pola konsumsi, kemiskinan, pembangunan manusia, ketenagakerjaan, dan perumahan serta memaparkan kondisi pengangguran semester I tahun 2011.

Saya mengharapkan publikasi ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai aspek kesejahteraan rakyat di Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat menjadi dasar dan acuan untuk menentukan arah kebijakan serta sebagai alat penilaian dan pemantauan terhadap pencapaian program pembangunan yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya sehingga publikasi ini dapat terwujud. Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang.

Medan, Desember 2011
BPS Provinsi Sumatera Utara
Kepala,

Drs. Suharno, M.Sc.
NIP 19550106 197703 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Sumber Data	2
1.4. Sistematika Penyajian	
II. PENJELASAN TEKNIS	3
2.1. Kependudukan	3
2.2. Pendidikan	4
2.3. Kesehatan	5
2.4. Fertilitas dan Keluarga Berencana	6
2.5. Perumahan	6
2.6. Ketenagakerjaan	7
III. KEPENDUDUKAN	9
3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	10
3.2. Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>)	13
3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk	15
IV. PENDIDIKAN	17
4.1. Angka Partisipasi Sekolah	18
4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	19
4.3. Angka Buta Huruf	21
V. KESEHATAN	23
5.1. Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>)	24
5.2. Penolong Kelahiran	25
5.5. Angka Kematian Bayi (<i>Infant Mortality Rate</i>)	27
5.4. Angka Harapan Hidup	28
VI. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	29
6.1. Usia Perkawinan Pertama	29
6.2. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i>)	31
6.3. Keluarga Berencana	33

VII. KEMISKINAN, POLA KONSUMSI DAN IPM	37
7.1. Kemiskinan	37
7.2. Pola Konsumsi	38
7.3. Pembangunan Manusia	41
VIII. KETENAGAKERJAAN	45
8.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	46
8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	47
8.3. Karakteristik Penduduk Bekerja	48
8.3.1. Lapangan Pekerjaan/Status Pekerjaan	48
8.3.2. Status Pekerjaan	50
8.3.3. Jam Kerja Seminggu	52
IX. PERUMAHAN	53
9.1. Kondisi Rumah	53
9.2. Fasilitas Rumah	56
X. ANALISIS DATA PENGANGGURAN SEMESTER I TAHUN 2011	60

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota 2000-2010	12
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2010	14
Tabel 3.3. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2010	16
Table 4.1. Persentase Penduduk 10 Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2010	20
Table 4.2. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2010	22
Tabel 6.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2010	30
Tabel 6.2. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Kabupaten/Kota, 2010	34
Tabel 6.3. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota. Dan Alat/Cara KB Yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2010	35
Tabel 7.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di Sumatera Utara, Maret 2010	38
Tabel 7.2. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995-2010	39
Tabel 7.3. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota, 2010	41
Tabel 7.4. Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia	42
Tabel 7.5. Perkembangan Tingkatan dan Status Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2009	44
Tabel 8.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 tahun Keatas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2008-2010	46
Tabel 8.2. Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Selama Informal Menurut Kabupaten/kota dan Tingkat Pendidikan, 2010	48

Tabel 9.1.	Kondisi Perumahan Sumatera Utara, 2006-2010	55
Tabel 9.2.	Kondisi Fasilitas Rumah Sumatera Utara, 2008-2010	57
Tabel 9.3.	Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2010	58
Tabel 9.4.	Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2010	59
Tabel 10.1.	Komposisi Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, 2010 dan Februari 2010	61
Tabel 10.2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara Menurut Kegiatan Utama, Februari, Agustus 2010 dan Februari 2011	62
Tabel 10.3.	Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2010-2011	63
Tabel 10.4.	Jumlah Setengah Penganggur Sumatera Utara Menurut Jenis Penganggur, Februari 2010-2011	64
Tabel 10.5.	Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan, Februari 2010-2011	65
Tabel 10.6.	Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari 2010-2011	66

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>	
Grafik 3.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara, 1961-2010	10
Grafik 4.1.	Perkembangan Partisipasi Sekolah Penduduk Sumatera Utara, 2004-2010	18
Grafik 4.2.	Persentase Penduduk Sumatera menurut Pendidikan ditamatkan, 2004-2010	19
Grafik 4.3.	Perkembangan Tingkat Buta Huruf Penduduk Sumatera Utara, 2004-2010	21
Grafik 5.1.	Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Sumatera Utara, 2004-2010	24
Grafik 5.2.	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri dengan Cara Pengobatannya Provinsi Sumatera Utara, 2010	25
Grafik 5.3.	Persentase Penolong Persalinan Bayi Provinsi Sumatera Utara, 2009	26
Grafik 5.4.	Kecenderungan Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Utara, 1999-2008	27
Grafik 5.5.	Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 1999-2009	28
Grafik 6.1.	Persentase Perempuan Dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2009	31
Grafik 6.2.	Perkembangan Tingkat Fertilitas (TFR) Provinsi Sumatera Utara, 1999 – 2008	32
Grafik 7.1.	Trend Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara, 1999-2010	38
Grafik 7.2.	Perkembangan IPM Sumatera Utara, 1990– 2009	43
Grafik 8.1.	Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara Menurut Lapangan Pekerjaan, 2006-2009	49
Grafik 8.2.	Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara Menurut Status Pekerjaan, 2010	51
Grafik 8.3.	Persentase Penduduk Bekerja di Sumatera Utara Menurut jam Kerja Seminggu, 2010	52
Grafik 9.1.	Persentase Rumahtangga di Sumatera Utara Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal, 2010	54
Grafik 9.2.	Persentase Rumahtangga di Sumatera Utara yang Mempunyai Lantai Terluas dari Tanah, 2010	56
Grafik 9.3.	Persentase Rumahtangga di Sumatera Utara yang dengan Sumber Penerangan dari Listrik, 2010	57
Grafik 9.4.	Persentase Rumahtangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Sumatera Utara, 2010	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan bangsa merupakan komitmen seluruh Bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan secara eksplisit telah dituangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, maka arah perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, maka diperlukan data dan kajian yang mendalam dan luas mengenai Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Tujuan

Penulisan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010 dan Analisis Data Pengangguran Semester I Tahun 2011 dimaksudkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara. Indikator ini dapat dijadikan sebagai kompas yang tepat dalam pelaksanaan pembangunan.

Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat dan Pengangguran ini, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan kejelasan mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan dimasa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun akan bersifat efektif dan efisien, utamanya untuk segera melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi yang berdasarkan indikator-indikator yang ada. Pada akhirnya usaha Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3. Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan. Selain itu juga diperkaya dengan data sekunder terutama yang berasal dari instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

1.4. Sistematika Penyajian

Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam 10 (sepuluh) bagian, yaitu :

Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat 2010 dan Analisis Data Pengangguran semester I tahun 2011. Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan. Selanjutnya, penyajian aspek kependudukan hasil SP2010 yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk disajikan pada bagian ketiga. Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi pendidikan di Sumatera Utara, dari sisi kualitas pendidikan penduduk. Kemudian dilanjutkan pembahasan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya. Aspek fertilitas dan keluarga berencana dibahas pada bagian enam. Aspek kemiskinan, pola konsumsi dan Indikator Pembangunan Manusia (IPM) serta ketenagakerjaan akan dibahas pada bagian tujuh dan delapan. Penyajian indikator kesejahteraan rakyat Sumatera Utara 2010 tentang aspek perumahan dibahas pada bagian sembilan. Untuk melengkapi penyajian publikasi ini, pada bagian akhir ditutup dengan analisis data pengangguran semester I tahun 2011.

BAB II

PENJELASAN TEKNIS

2.1. Kependudukan

- Tipe Daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, jika desa mempunyai 5 persen rumah tangga pertanian atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk,

sedangkan kekuatan yang mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, sedangkan laju pertumbuhan sosial hanya dipengaruhi oleh migrasi

- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.

2.2. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.3. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Pemeriksaan kesehatan adalah pengamatan tingkat kesehatan seseorang baik karena mempunyai keluhan maupun untuk mengetahui ada tidaknya penyakit sedini mungkin. Pemeriksaan kesehatan dapat bersifat menyeluruh, atau sebagian dari tubuh, atau sebagian kecil saja dari tubuh.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau meng-atasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri.
- Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Kematian Bayi adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran dalam satu tahun.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.
- Angka Fertilitas Total adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya dengan asumsi bahwa perilaku kelahirannya sama untuk setiap kelompok umur.

2.4. Fertilitas Dan Keluarga Berencana

- Anak lahir hidup adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang mem-praktekkan salah satu metode kontrasepsi.

- Peserta keluarga berencana (akseptor) baru adalah orang yang baru pertama kali memakai/mempergunakan metode kontrasepsi dan ak-septor sesudah persalinan/keguguran.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun

2.5. Konsumsi Dan Pengeluaran Rumah Tangga

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Termasuk pula seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh dan mengurus keperluan sendiri.

- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air ledeng adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air Sumur/perigi terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

2.7. Ketenagakerjaan

- Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan mendapat pekerjaan.
- Bukan Angkatan Kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.

- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas).
Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

BAB III KEPENDUDUKAN

Secara teoritis jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu kekayaan dan modal dasar pembangunan. Hal ini dapat terjadi jika jumlah penduduk yang besar dapat diberdayakan sesuai kodrat, keahlian dan bidang kerjanya masing-masing. Sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar tadi tidak dapat diberdayakan dan dikendalikan secara bijak dan terencana, maka akan menjadi beban pembangunan. Aspek kependudukan yang perlu mendapat perhatian mencakup jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial harus mendapat prioritas utama karena bermuara kepada peningkatan kesejahteraan penduduk. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam penanganan masalah kependudukan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk, juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

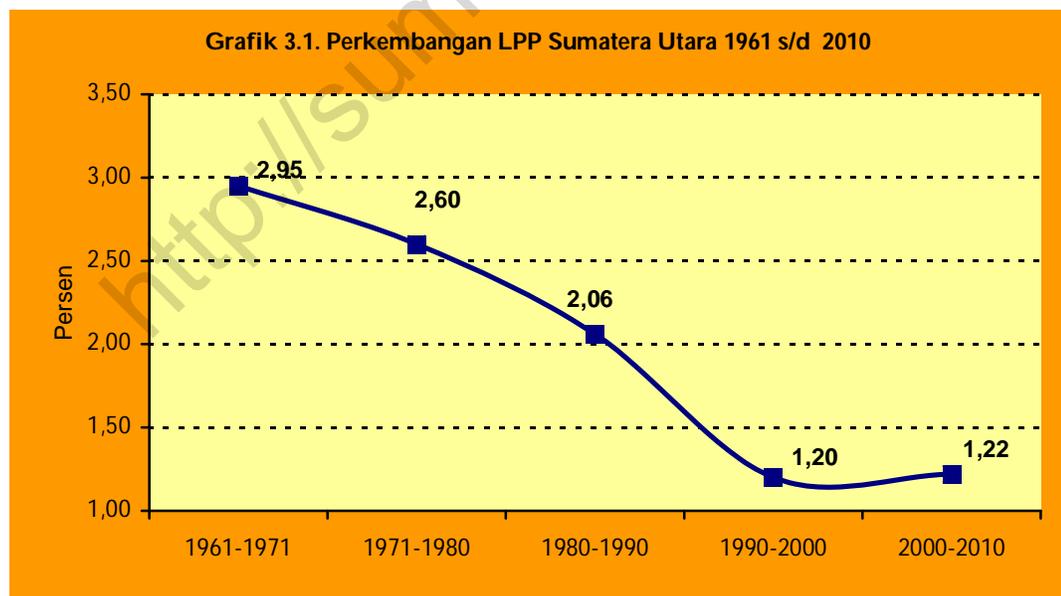
Komposisi penduduk menurut struktur umur penduduk merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana beban tanggungan penduduk. Ketidakeimbangan komposisi antara kelompok umur produktif dengan non produktif akan menyebabkan permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Demikian juga halnya dengan distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Tingkat pemerataan hasil pembangunan akan mempengaruhi penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah dimana terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempati sebelumnya

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian. Ketiga komponen ini turut serta dalam perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, dan politik serta pertahanan.

Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan, dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Sumatera Utara tercatat sebesar 12.982.204 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama 4 (empat) dekade (1961-2010) terus mengalami penurunan. Pada periode 1961-1971 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat 2,95 persen kemudian turun menjadi 2,60 persen dan 2,06 persen periode 1971-1980 dan 1980-1990. Angka laju pertumbuhan penduduk tersebut kembali turun pada periode 1990-2000 yaitu menjadi 1,20 persen. Selanjutnya periode 2000-2010 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara adalah sebesar 1,22 persen (*grafik 3.1*).



Dengan jumlah penduduk yang relatif besar, permasalahan kependudukan di Sumatera Utara perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang dilaksanakan.

Pada tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Sumatera Utara menurut kabupaten/kota serta laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010. Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat merupakan tiga kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling banyak, masing-masing berjumlah 2.097.612 jiwa, 1.790.431 jiwa dan 967.535 jiwa. Sebaliknya Pakpak Bharat adalah kabupaten dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu berjumlah 40.505 jiwa. Dilihat laju pertumbuhan penduduknya, beberapa kabupaten/kota yang relatif tinggi adalah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 2,46 persen, dan Kabupaten Karo 2,17 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah disebabkan daerah ini menjadi pusat perkembangan ekonomi baru di Pantai Barat dan daerah transit dari beberapa kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Barat, Nias Utara dan Kota Gunungsitoli. Sedangkan tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo yang merupakan salah satu daerah agraris utama yang termasuk dalam kawasan Agropolitan di Sumatera Utara kemungkinan menjadi daya tarik bagi penduduk kabupaten lain di sekitarnya untuk melakukan perpindahan ke daerah tersebut. Sebaliknya, beberapa daerah lain di Sumatera Utara, laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah antara lain Kabupaten Simalungun sebesar minus 0,46 persen, Kabupaten Toba Samosir sebesar minus 0,38 persen dan Kota Pematang Siantar minus 0,29 persen.

Tabel 3.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2000-2010

Kota/Kabupaten	Tahun		Laju Pertumbuhan/ tahun (%) 2000-2010
	2000 (jiwa)	2010 (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	683.416	131.377	1,03
2. Mandailing Natal	359.849	404.945	1,20
3. Tapanuli Selatan	734.364	263.812	2,12
4. Tapanuli Tengah	244.679	311.232	2,46
5. Tapanuli Utara	407.711	279.257	1,02
6. Toba Samosir	304.125	173.129	-0,38
7. Labuhan Batu	844.924	415.110	1,95
8. Asahan	935.855	668.272	1,11
9. Simalungun	855.802	817.720	-0,46
10. Dairi	292.857	270.053	0,59
11. Karo	283.713	350.960	2,17
12. Deli Serdang	1.959.488	1.790.431	2,00
13. Langkat	906.565	967.535	0,66
14. Nias Selatan	1)	289.708	x
15. Humbang Hasundutan	1)	171.650	x
16. Pakphak Barat	1)	40.505	x
17. Samosir	1)	119.653	x
18. Serdang Bedagai	1)	593.711	x
19. Batubara	1)	375.885	x
20. Padang Lawas Utara	1)	223.531	x
21. Padang Lawas	1)	225.259	x
22. Labuhan Batu Selatan	1)	277.673	x
23. Labuhan Batu Utara	1)	330.701	x
24. Nias Utara	1)	127.244	x
25. Nias Barat	1)	81.807	x
Kota			
26. Sibolga	82.310	84.481	0,26
27. Tanjung Balai	132.438	154.445	1,56
28. Pematang Siantar	241.524	234.697	-0,29
29. Tebing Tinggi	125.006	145.248	1,52
30. Medan	1.905.587	2.097.612	0,97
31. Binjai	213.760	246.154	1,43
32. Padangsidempuan	1)	191.531	0,26
33. Gunung Sitoli	1)	126.202	1,56
Sumatera Utara	11.513.973	12.982.204	1,22

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara dan Hasil SP2010

Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang, Asahan dan Tapsel)

3.2. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk perempuan di Sumatera Utara umumnya selalu lebih banyak dari penduduk laki-laki, yang diperlihatkan melalui rasio jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 diketahui jumlah penduduk laki-laki di Sumatera Utara 6.483.354 jiwa dan perempuan 6.498.850 jiwa atau sex ratio sebesar 99,76 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,76 penduduk laki-laki.

Dilihat masing-masing kabupaten/kota di Sumatera Utara, pada tahun 2010 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebesar 104,31 disusul Labuhan Batu Utara dan Pakpak Bharat yaitu masing-masing sebesar 102,21 dan 102,15. Hal ini dapat diduga karena daerah ini umumnya adalah daerah pertanian yang lebih menuntut peran laki-laki. Sebaliknya Kabupaten Nias Barat adalah kabupaten dengan sex ratio paling kecil yaitu 91,76 disusul kabupaten lainnya yang ada di Pulau Nias. Kondisi ini menunjukkan bahwa umumnya penduduk laki-laki di wilayah tersebut cenderung pergi keluar untuk bekerja atau bersekolah. Salah satu daerah tujuan mereka adalah ke Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, dan Jenis Kelamin, 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Sex Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Nias	64 057	67 320	131 377	95,15
2. Mandailing Natal	199 037	205 908	404 945	96,66
3. Tapanuli Selatan	131 200	132 615	263 815	98,93
4. Tapanuli Tengah	156 377	154 855	311 232	100,98
5. Tapanuli Utara	138 156	141 101	279 257	97,91
6. Toba Samosir	86 101	87 028	173 129	98,93
7. Labuhan Batu	209 924	205 186	415 110	102,31
8. Asahan	335 945	332 327	668 272	101,09
9. Simalungun	407 838	409 882	817 720	99,50
10. Dairi	135 004	135 049	270 053	99,97
11. Karo	174 418	176 542	350 960	98,80
12. Deli Serdang	901 915	888 516	1 790 431	101,51
13. Langkat	487 676	479 859	967 535	101,63
14. Nias Selatan	143 988	145 720	289 708	98,81
15. Humbang Hasundutan	85 344	86 306	171 650	98,89
16. Pakpak Bharat	20 468	20 037	40 505	102,15
17. Samosir	59 504	60 149	119 653	98,93
18. Serdang Bedagai	298 614	295 769	594 383	100,96
19. Batubara	189 328	186 557	375 885	101,49
20. Padang Lawas Utara	112 357	111 174	223 531	101,06
21. Padang Lawas	112 987	112 272	225 259	100,64
22. Labuhan Batu Selatan	141 765	135 908	277 673	104,31
23. Labuhan Batu Utara	167 154	163 547	330 701	102,21
24. Nias Utara	63 061	64 183	127 244	98,25
25. Nias Barat	39 146	42 661	81 807	91,76
Kota				
26. Sibolga	42 408	42 073	84 481	100,80
27. Tanjung Balai	77 933	76 512	154 445	101,86
28. Pematang Siantar	114 561	120 137	234 698	95,36
29. Tebing Tinggi	71 892	73 356	145 248	98,00
30. Medan	1 036 926	1 060 684	2 097 610	97,76
31. Binjai	122 997	123 157	246 154	99,87
32. Padangsidimpuan	93 434	98 097	191 531	95,25
33. Gunung Sitoli	61 839	64 363	126 202	96,08
Sumatera Utara	6 483 354	6 498 850	12 982 204	99,76

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sumatera Utara

3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah masih timpangnya penyebaran penduduk antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara yang luasnya 265,10 kilometer persegi atau 0,37 persen dari luas daratan Sumatera Utara, adalah kota terpadat yang setiap kilometer persegi-nya ditempati 7.953 jiwa. Disusul Kota Sibolga yang berada di Pantai Barat Sumatera Utara, dengan luas hanya 0,02 persen dari luas daratan Sumatera Utara memiliki kepadatan penduduk mencapai 7.844 jiwa/km². Pada umumnya daerah perkotaan mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi. Kondisi ini disebabkan daerah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi orang untuk melakukan migrasi.

Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah tersebar di wilayah kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Pakpak Bharat hanya dihuni oleh 33 jiwa per kilometer persegi, disusul Kabupaten Padang Lawas Utara dan Padang Lawas yaitu 57 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 3.3. Jumlah Penduduk, Kepadatan dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2010

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Distribusi (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	131 377	134	1,01
2. Mandailing Natal	404 945	61	3,12
3. Tapanuli Selatan	263 815	61	2,03
4. Tapanuli Tengah	311 232	144	2,40
5. Tapanuli Utara	279 257	74	2,15
6. Toba Samosir	173 129	74	1,33
7. Labuhan Batu	415 110	162	3,20
8. Asahan	668 272	182	5,15
9. Simalungun	817 720	187	6,30
10. Dairi	270 053	140	2,08
11. Karo	350 960	165	2,70
12. Deli Serdang	1 790 431	720	13,79
13. Langkat	967 535	154	7,45
14. Nias Selatan	289 708	178	2,23
15. Humb.Hasundutan	171 650	75	1,32
16. Pakphak Barat	40 505	33	0,31
17. Samosir	119 653	49	0,92
18. Serdang Bedagai	594 383	311	4,57
19. Batubara	375 885	415	2,90
20. Pd.Lawas Utara	223 531	57	1,72
21. Padang Lawas	225 259	58	1,74
22. Lab. Batu Selatan	277 673	89	2,14
23. Lab. Batu Utara	330 701	93	2,55
24. Nias Utara	127 244	85	0,98
25. Nias Barat	81 807	150	0,63
Kota			
71. Sibolga	84 481	7.844	0,65
72. Tanjung Balai	154 445	2.510	1,19
73. Pematang Siantar	234 698	2.935	1,81
74. Tebing Tinggi	145 248	3.779	1,12
75. Medan	2 097 610	7.913	16,16
76. Binjai	246 154	2.728	1,90
77. Padangsidempuan	191 531	1.671	1,48
78. Gunung Sitoli	126 202	269	0,97
Sumatera Utara	12 982 204	181	100,00

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Sumatera Utara

BAB IV PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian pula dijelaskan dalam Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 dan pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Oleh sebab itu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan amanat yang harus dilaksanakan bangsa ini karena pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia-manusia yang terampil dan produktif sehingga pada gilirannya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (***Education For All***), Konvensi Hak Anak (***Convention on the Right of Child***) dan ***Millenium Development Goals (MDGs)*** yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

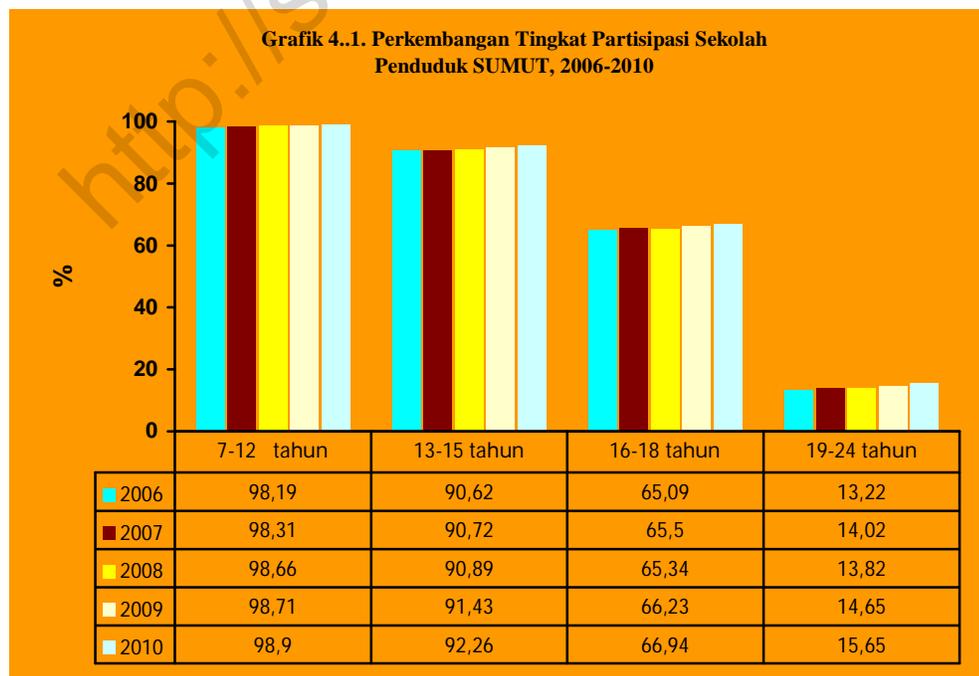
Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, dimana banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah

penghasilan keluarga. Ditengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian disusul dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program diluar pendidikan formal, diantaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

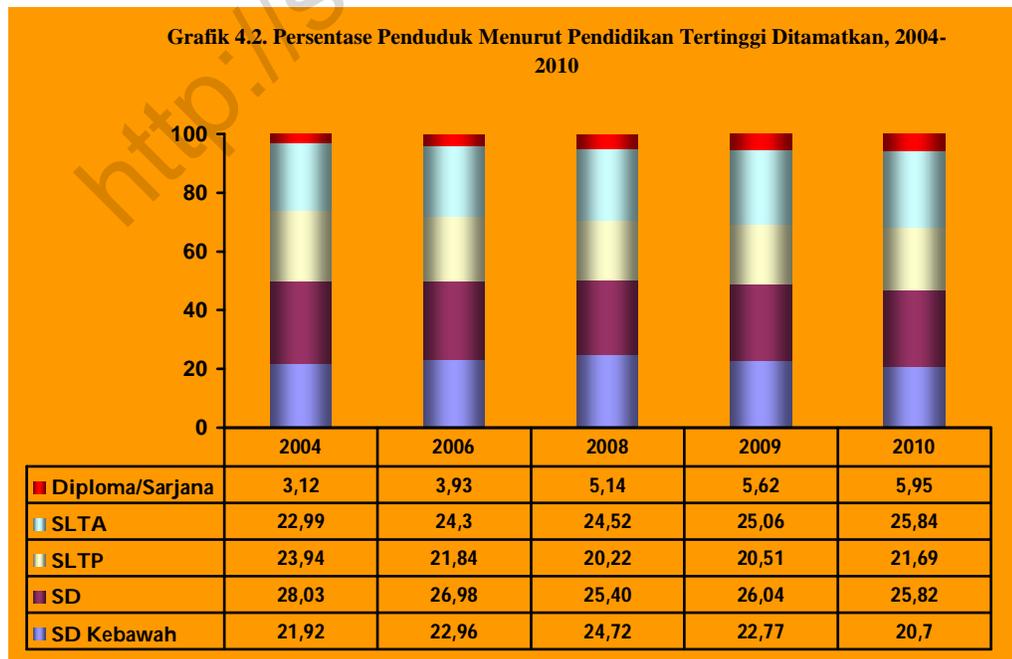


Grafik 4.1. menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah penduduk Sumatera Utara terus meningkat. Pada usia 7-12 tahun meningkat dari 98,19 persen tahun 2006 menjadi 98,90 persen pada tahun 2010. Kemudian pada kelompok umur 13-15 meningkat dari 90,62 persen menjadi 92,26 persen pada tahun yang sama. Demikian juga pada kelompok umur 16-18 dan 19-24 tahun, dimana keduanya menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2006.

4.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan merupakan salah satu penghambat dalam percepatan pembangunan, karena pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Hakekat pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Dari grafik 4.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk dewasa di Sumatera Utara mengalami peningkatan terutama pada tingkat pendidikan SLTA dan Perguruan Tinggi. Pada tahun 2004 sekitar 23 persen penduduk dewasa di Sumatera berpendidikan SLTA, meningkat menjadi 25,84 persen pada tahun 2010. Pendidikan minimal DI/DII meningkat dari 3,12 persen pada tahun 2004 menjadi 5,95 persen pada tahun 2010.



Tabel 4.1. Persentase Penduduk 10 Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2010

Kabupaten/Kota	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Yang Ditamatkan						
			SD	SLTP	SLTA	SLTA Kej	D1/ D2	D 3	D4/ S1/S2/S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1. Nias	20,51	28,66	31,27	11,68	6,05	1,00	0,34	0,15	0,34
2. Mandailing Natal	1,22	19,91	43,03	18,54	11,08	2,71	0,48	0,80	2,23
3. Tapanuli Selatan	1,09	18,93	36,51	21,61	15,15	3,35	0,72	1,15	1,48
4. Tapanuli Tengah	3,49	29,84	24,76	19,49	13,76	4,39	0,80	0,75	2,72
5. Tapanuli Utara	2,09	18,41	28,34	21,16	15,72	8,52	0,77	1,37	3,62
6. Toba Samosir	1,47	15,83	21,79	21,90	19,89	11,55	1,21	1,80	4,54
7. Labuhan Batu	2,25	17,31	28,99	23,13	19,80	4,14	0,29	1,26	2,84
8. Asahan	4,89	23,47	28,79	19,63	15,18	4,35	0,55	0,92	2,22
9. Simalungun	2,06	18,71	25,90	23,74	18,35	7,14	0,41	1,33	2,36
10. Dairi	1,46	19,32	30,03	24,74	16,19	3,91	0,97	1,42	1,98
11. Karo	2,18	16,12	25,11	23,16	23,43	4,81	0,55	1,84	2,79
12. Deli Serdang	0,92	17,08	20,98	21,85	22,94	9,18	0,64	1,88	4,52
13. Langkat	3,10	21,46	29,57	23,34	15,21	4,65	0,29	0,70	1,69
14. Nias Selatan	31,24	26,29	22,25	11,89	6,42	0,74	0,26	0,37	0,55
15. Humb.Hasundutan	3,05	17,55	26,72	26,67	16,22	5,30	1,17	1,24	2,09
16. Pakphak Barat	2,83	23,69	30,20	21,65	11,69	6,25	1,10	0,78	1,80
17. Samosir	4,46	17,95	26,63	21,81	19,83	3,20	0,81	2,05	3,26
18. Serdang Bedagai	1,99	20,41	29,56	22,67	15,87	6,19	0,57	0,46	2,29
19. Batubara	3,12	24,29	28,56	22,33	11,51	6,43	0,72	0,69	2,34
20. Pd.Lawas Utara	0,59	16,55	34,56	24,42	18,16	3,04	0,40	0,53	1,76
21. Padang Lawas	2,10	19,29	37,90	21,25	13,54	2,35	0,56	0,66	2,36
22. Lab. Batu Selatan	1,77	18,51	33,82	23,11	15,79	4,00	0,30	1,23	1,47
23. Lab. Batu Utara	1,49	22,16	32,15	24,74	13,64	3,28	0,49	0,63	1,42
24. Nias Utara	12,65	30,75	29,56	14,55	8,08	1,55	1,19	0,20	1,47
25. Nias Barat	22,39	25,71	24,12	13,85	10,27	0,58	1,11	0,58	1,42
Kota									
71. Sibolga	1,41	16,43	24,38	20,97	23,62	6,86	0,81	1,41	4,11
72. Tanjung Balai	1,28	18,65	31,09	19,64	18,46	5,40	0,52	1,51	3,45
73. Pematang Siantar	1,18	12,39	16,33	21,97	27,80	8,19	1,84	3,33	6,96
74. Tebing Tinggi	1,08	13,97	22,96	20,65	24,35	9,66	0,82	1,85	4,67
75. Medan	0,47	9,28	18,21	21,52	32,67	5,75	0,66	2,90	8,56
76. Binjai	0,95	11,69	22,28	25,70	27,74	6,33	0,79	1,04	3,49
77. Padangsidempuan	0,33	13,00	22,99	22,55	26,08	5,12	0,85	2,22	6,85
78. Gunung Sitoli	8,74	23,58	23,22	17,20	17,00	3,33	0,89	1,68	4,38
Sumatera Utara	2,86	17,84	25,82	21,69	20,16	5,68	0,62	1,50	3,82
• Perkotaan	1,06	13,74	20,73	21,72	26,37	7,25	0,76	2,27	6,11
• Pedesaan	4,67	21,96	30,93	21,66	13,93	4,10	0,48	0,72	1,54

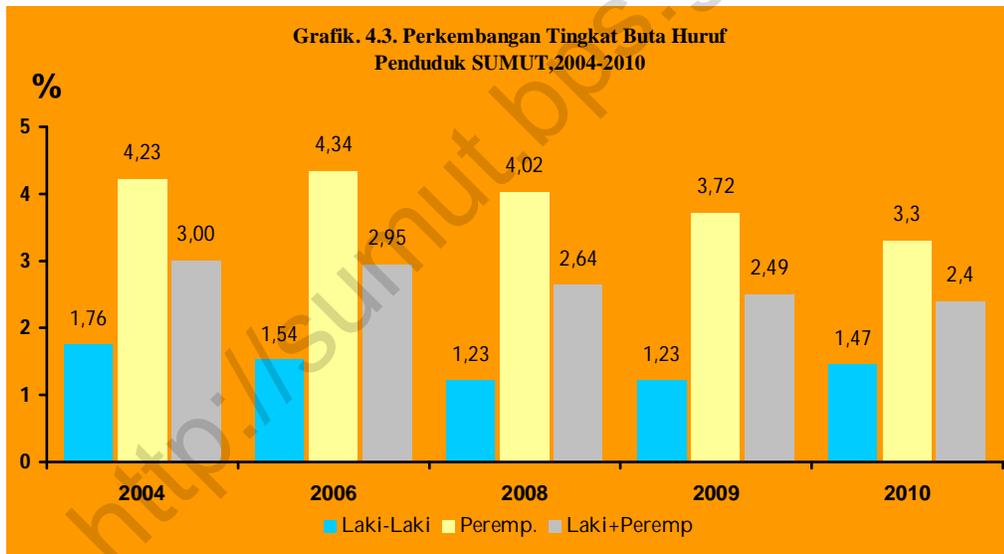
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Kondisi tingkat pendidikan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 4.2 diatas, dimana hal yang perlu mendapat perhatian adalah seperti di Kabupaten yang berada di Pulau Nias yaitu Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Nias Utara serta Kota

Gunung Sitoli dimana persentase penduduk 10 tahun keatas yang tidak/belum pernah sekolahnya sangat tinggi, seperti di Nias Selatan yang mencapai 31,24 persen kemudian Nias Barat 22,39 persen, Nias 20,51 persen. Jika dibandingkan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, persentase penduduk yang menamatkan tingkat pendidikan atas di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding daerah perdesaan.

4.3. Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) penduduk berumur 10 tahun keatas. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.



Selama periode 2004 sampai 2010, tingkat buta huruf penduduk Sumatera Utara menunjukkan penurunan, yaitu dari 3,00 persen pada tahun 2004 menjadi 2,40 persen pada tahun 2010. Hal yang cukup menarik adalah tingginya tingkat buta huruf perempuan dibanding laki-laki. Pada tahun 2004 tingkat buta huruf perempuan mencapai 4,23 persen lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 1,76 persen. Kondisi tahun 2009 tidak berbeda dimana tingkat buta huruf perempuan masih lebih tinggi yaitu 3,3 persen dibanding laki-laki sebesar 1,47 persen.

Tabel 4.2 Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 10 tahun keatas Menurut Kabupaten/kota dan Jenis Kelamin, 2010

Kabupaten/Kota	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Nias	91,79	8,21	91,33	8,67	91,56	8,44
2. Mandailing Natal	99,20	0,80	98,35	1,65	98,75	1,25
3. Tapanuli Selatan	99,45	0,55	98,81	1,19	99,13	0,87
4. Tapanuli Tengah	97,40	2,60	93,35	6,65	95,32	4,68
5. Tapanuli Utara	98,42	1,58	96,57	3,43	97,49	2,51
6. Toba Samosir	99,41	0,59	97,79	2,21	98,58	1,42
7. Labuhan Batu	98,60	1,40	96,54	3,46	97,56	2,44
8. Asahan	96,60	3,40	96,56	3,44	96,58	3,42
9. Simalungun	99,20	0,80	96,28	3,72	97,72	2,28
10. Dairi	99,16	0,84	97,46	2,54	98,30	1,70
11. Karo	99,26	0,74	97,22	2,78	98,26	1,74
12. Deli Serdang	99,51	0,49	97,93	2,07	98,72	1,28
13. Langkat	98,17	1,83	96,47	3,53	97,31	2,69
14. Nias Selatan	87,22	12,78	82,78	17,22	84,99	15,01
15. Humb.Hasundutan	99,10	0,90	94,45	5,55	96,80	3,20
16. Pakphak Barat	98,51	1,49	95,13	4,87	96,91	3,09
17. Samosir	98,25	1,75	95,43	4,57	96,85	3,15
18. Serdang Bedagai	98,01	1,99	95,75	4,25	96,88	3,12
19. Batubara	97,93	2,07	93,50	6,50	95,65	4,35
20. Pd.Lawas Utara	99,78	0,22	98,89	1,11	99,33	0,67
21. Padang Lawas	98,29	1,71	98,57	1,43	98,43	1,57
22. Lab. Batu Selatan	99,54	0,46	98,28	1,72	98,91	1,09
23. Lab. Batu Utara	99,08	0,92	96,33	3,67	97,69	2,31
24. Nias Utara	94,90	5,10	85,81	14,19	90,25	9,75
25. Nias Barat	91,32	8,68	82,08	17,92	86,55	13,45
Kota						
71. Sibolga	99,22	0,78	98,74	1,26	98,97	1,03
72. Tanjung Balai	99,13	0,87	97,97	2,03	98,53	1,47
73. Pematang Siantar	100,00	0,00	98,37	1,63	99,18	0,82
74. Tebing Tinggi	99,58	0,42	98,08	1,92	98,82	1,18
75. Medan	99,75	0,25	99,01	0,99	99,38	0,62
76. Binjai	99,48	0,52	98,17	1,83	98,83	1,17
77. Padangsidimpuan	99,75	0,25	99,58	0,42	99,67	0,33
78. Gunung Sitoli	95,32	4,68	89,09	10,91	92,13	7,87
Sumatera Utara	98,53	1,47	96,70	3,30	97,60	2,40
• Perkotaan	99,38	0,62	98,14	1,86	98,76	1,24
• Pedesaan	97,68	2,32	95,24	4,76	96,45	3,55

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Tabel 4.3 menunjukkan persentase penduduk yang buta huruf menurut kabupaten/kota. Kabupaten Nias Selatan mempunyai persentase penduduk yang buta huruf mencapai angka 15,01 persen. Disusul Nias Barat 13,4 persen. Tingginya angka buta huruf di daerah tersebut disebabkan antara lain sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas, baik menuju ke daerah tersebut maupun antar desa atau kecamatan

<http://sumut.bps.go.id>

BAB V KESEHATAN

Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan.

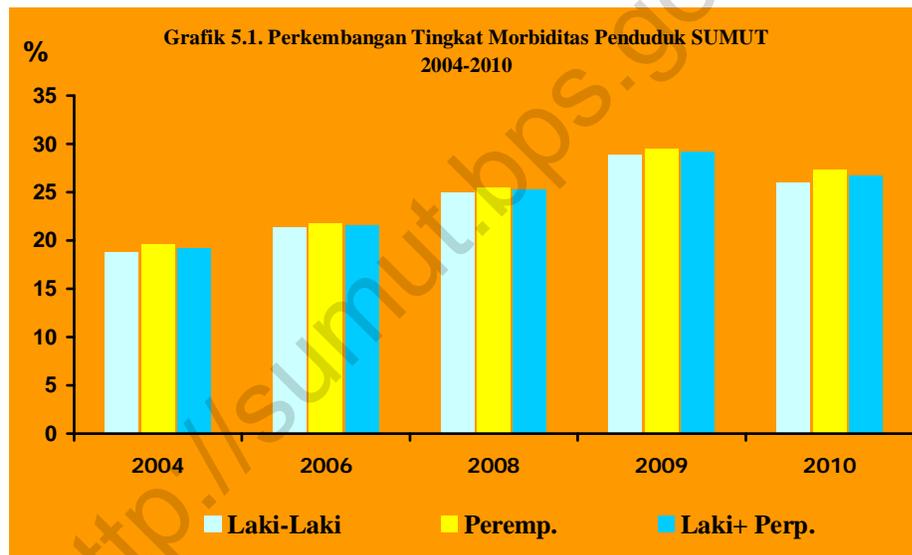
Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

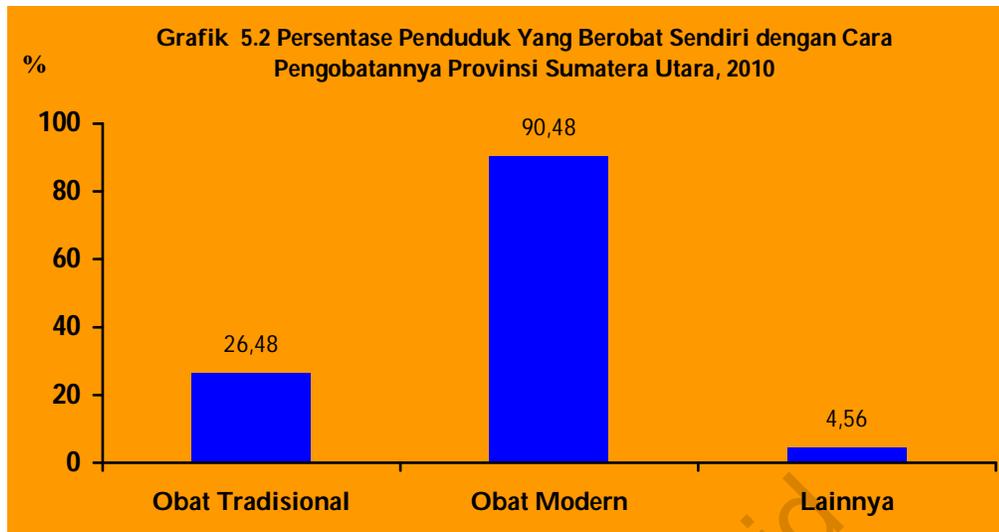
5.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam sebulan yang lalu. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Selama periode 2004 s/d 2010, tingkat morbiditas di Sumatera Utara menunjukkan pola yang naik. Pada tahun 2004 sebanyak 19,19 persen penduduk Sumatera Utara mengalami keluhan kesehatan. Pada tahun 2008 dan 2010 naik menjadi 25,29 persen dan 26,18 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, perempuan lebih banyak menderita keluhan kesehatan. Hal ini terlihat dari persentase wanita yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 27,0 persen dan pria 26,07 persen pada tahun 2010.



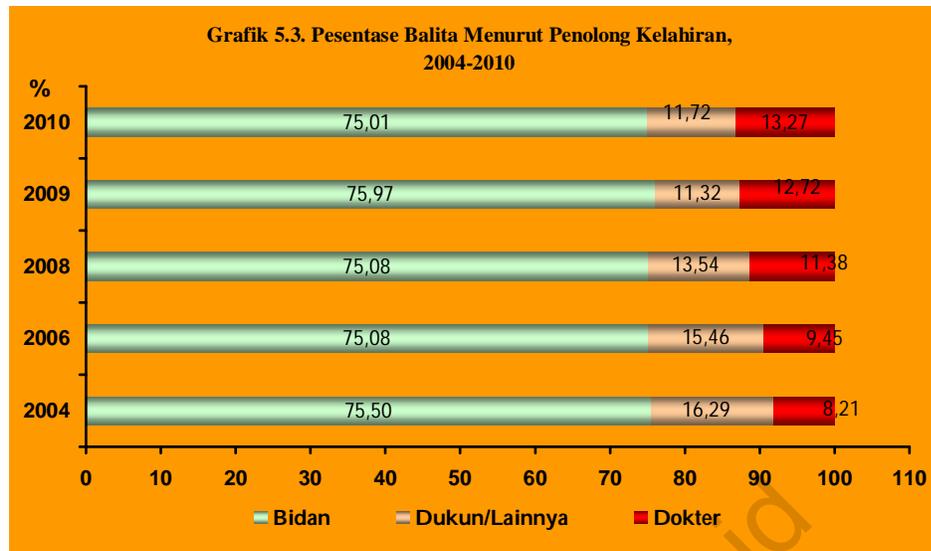
Grafik 5.2 menunjukkan persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan yang lalu. Angka persentase yang dihasilkan pada Susenas merupakan hasil pengolahan dari pertanyaan kepada responden tentang pengobatan sendiri. Dari jawaban responden yang melakukan pengobatan sendiri dengan cara memakai obat tradisional sebanyak 26,48 persen, kemudian yang memakai obat modern sebanyak 90,8 persen dan cara lainnya sebanyak 4,56 persen. Persentase penduduk yang berobat sendiri dengan cara pengobatannya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



5.2. Penolong Kelahiran

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum.

Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga media seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.



Pada periode 2004-2010 penolong kelahiran balita di Sumatera Utara pada umumnya adalah bidan, yaitu sekitar 75 persen. Kelahiran ditolong oleh bidan. Tingginya penolong kelahiran oleh bidan, sangat mungkin disebabkan tingkat kepercayaan terhadap bidan sangat tinggi dan adanya program yang dilaksanakan pemerintah. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dukun. Pada tahun 2010 sebanyak 11,72 persen kelahiran ditolong dukun. Angka ini lebih rendah dibanding tahun 2004 yang mencapai 16,29 persen.

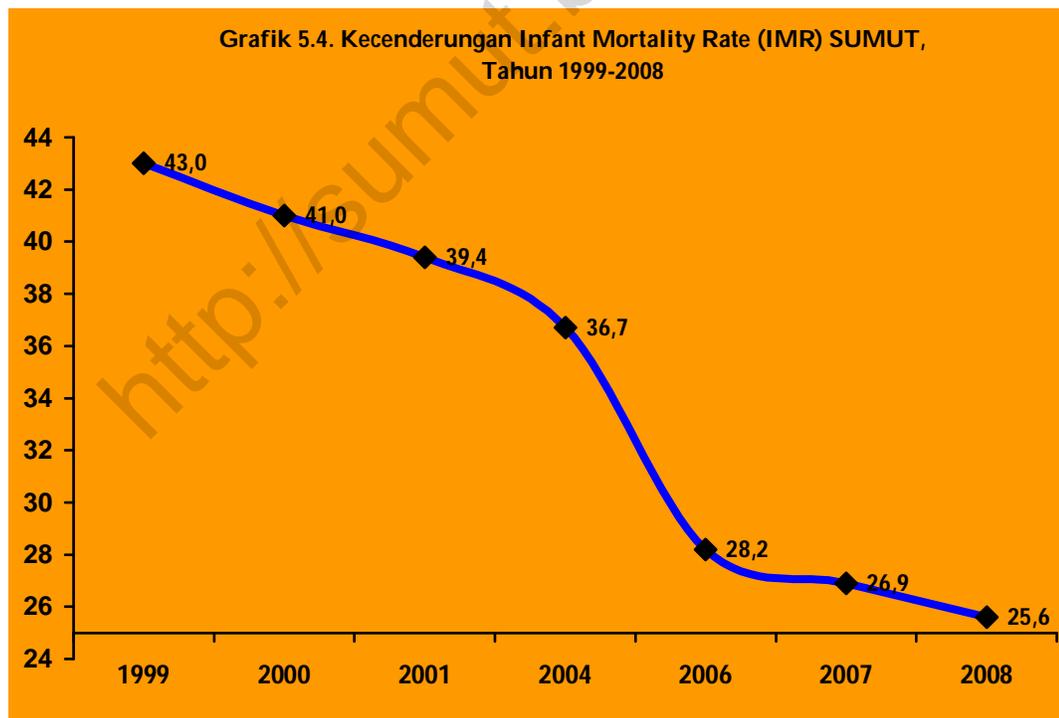
Masih besarnya peranan dukun dalam membantu kelahiran balita perlu terus mendapat perhatian. Usaha yang mungkin dapat dilakukan adalah menambah kekurangan tenaga medis secara merata di daerah-daerah tertentu di Sumatera Utara serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan dukun bayi agar mengerti tata cara menolong kelahiran yang aman dan sehat. Karena tidak tertutup kemungkinan bahwa di daerah tertentu masyarakat dengan alasan ekonomi dan pendidikan masih cenderung percaya kepada dukun dibandingkan dengan tenaga medis.

Tenaga penolong kelahiran oleh dokter belum mempunyai peran yang besar, karena biasanya hanya pada kasus tertentu saja proses kelahiran ditolong oleh dokter yaitu jika bidan sudah merasa tidak mampu lagi karena terjadi masalah. Pada tahun 2004 hanya 8,21 persen kelahiran yang ditolong dokter, dan meningkat menjadi 13,27 persen pada tahun 2010.

5.3. Angka Kematian bayi

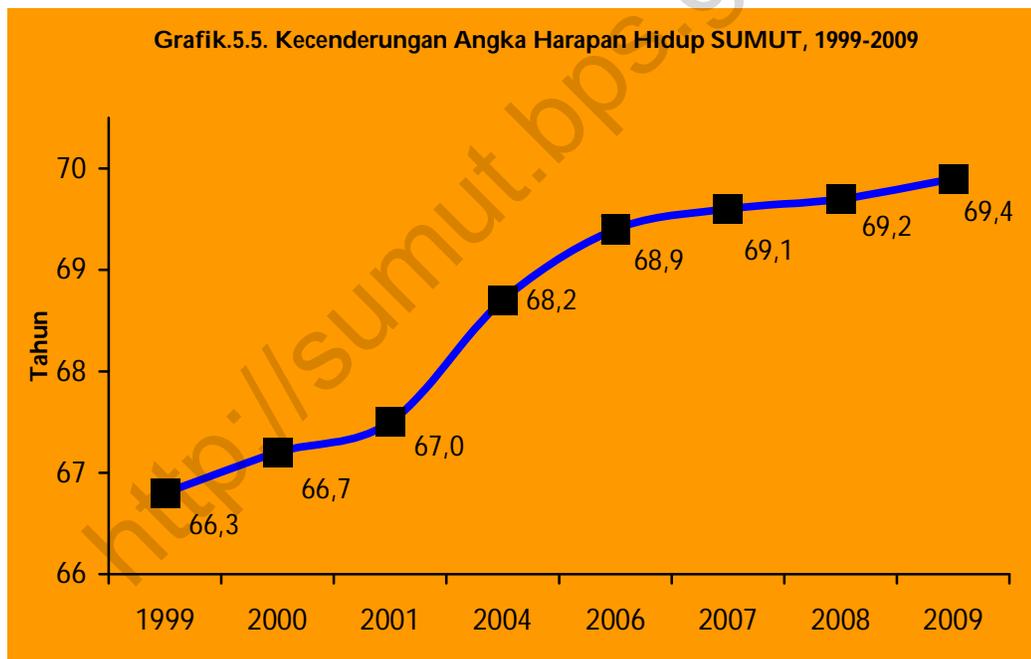
Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate/IMR*) dapat menggambarkan tingkat kesehatan penduduk secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data hasil sensus/survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan kesehatan dimasa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun perbaikan tingkat hidup penduduk, akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.

Angka Kematian Bayi di Sumatera Utara selama periode 1999-2008 mengalami penurunan. Pada tahun 1999, IMR diperkirakan sebesar 43,0 dan terus menurun menjadi 41,0 pada tahun 2000. Pada tahun 2008 menurun lagi menjadi 26,9 dan tahun 2008 kembali turun menjadi 25,6.



5.4. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan IMR, maka AHH menunjukkan peningkatan (*Grafik 5.5*).



Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

BAB VI

FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Fertilitas merupakan salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk selain kematian dan migrasi. Fertilitas menyangkut banyaknya anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan sangat erat kaitannya terhadap beban rumah tangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera. Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya yaitu usia antara 15-49 tahun. Hal ini disebabkan kemungkinan wanita melahirkan pada usia tersebut cukup besar.

Hal lain yang cukup penting diperhatikan dalam melihat tingkat kelahiran ini adalah usia wanita saat perkawinan pertama. Semakin muda usia saat perkawinan pertamanya, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama, semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

6.1. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. Kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan berulang kali sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya mempunyai anak.

Tabel 6.1 menampilkan persentase wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama. Secara umum, sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (54,86 persen). Persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun lebih sedikit yaitu 7,93 persen.

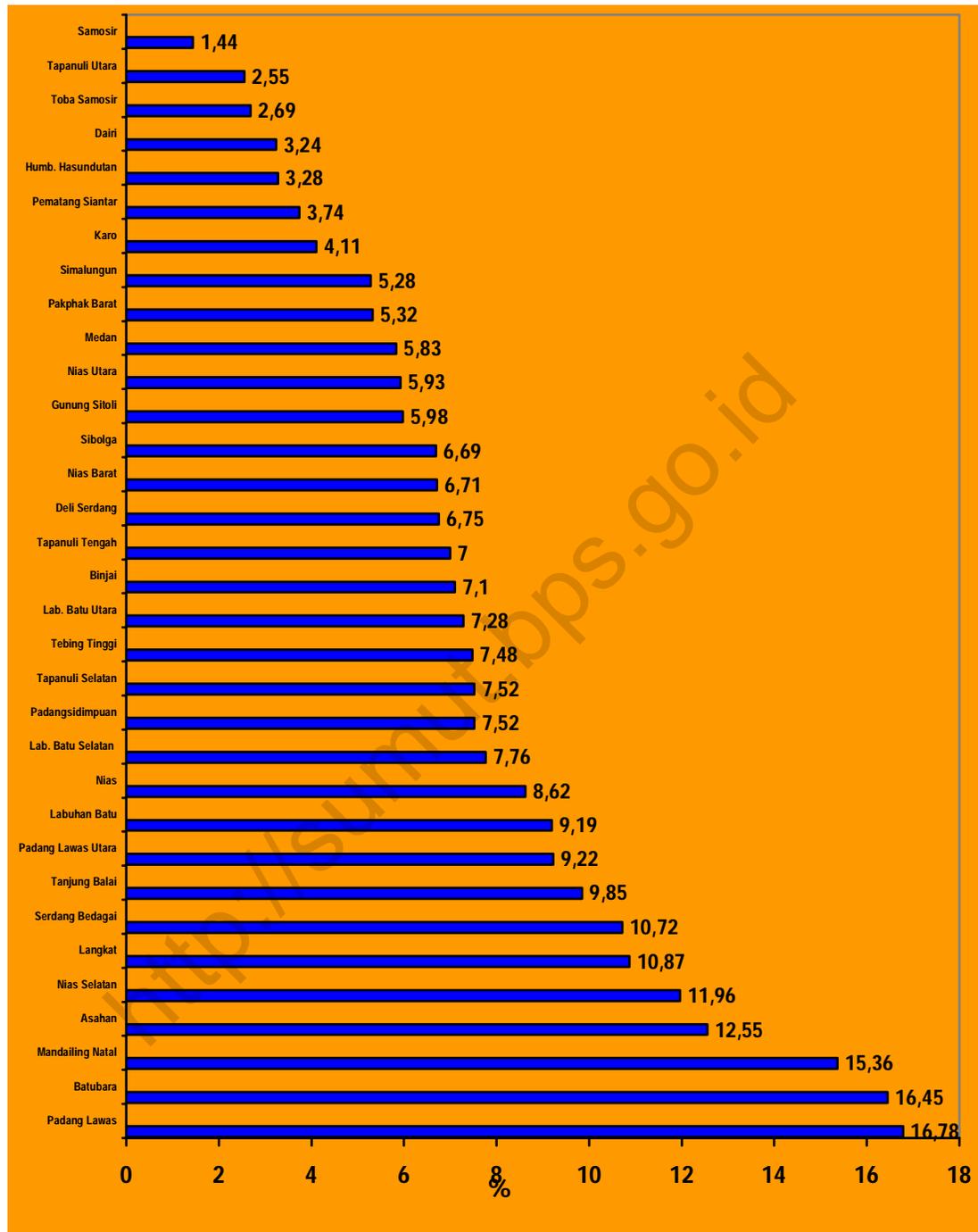
Tabel 6.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2010

Usia Perkawinan Pertama	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 16	6,90	8,92	7,93
17 – 18	15,03	18,88	17,00
19 – 24	53,51	56,16	54,86
25 – 34	23,70	15,16	19,34
35 +	0,87	0,87	0,87

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Ditinjau dari daerah perkotaan dan pedesaan, terlihat bahwa perkawinan dalam usia muda lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Menurut daerah kabupaten/kota, persentase wanita yang pernah kawin pada usia muda (kurang dari 17 tahun) cukup bervariasi, dengan persentase terendah di Kabupaten Samosir (1,44 persen) dan yang tertinggi di Kabupaten Padang Lawas (16,78 persen). Usia perkawinan di bawah usia 17 tahun menurut daerah kabupaten/kota ditampilkan pada grafik 6.1. Untuk daerah kota, persentase wanita dengan usia kawin pertama di bawah 17 tahun tertinggi adalah Kota Tanjung Balai (9,85 persen) dan terendah berada di Kota Pematang Siantar (3,74 persen).

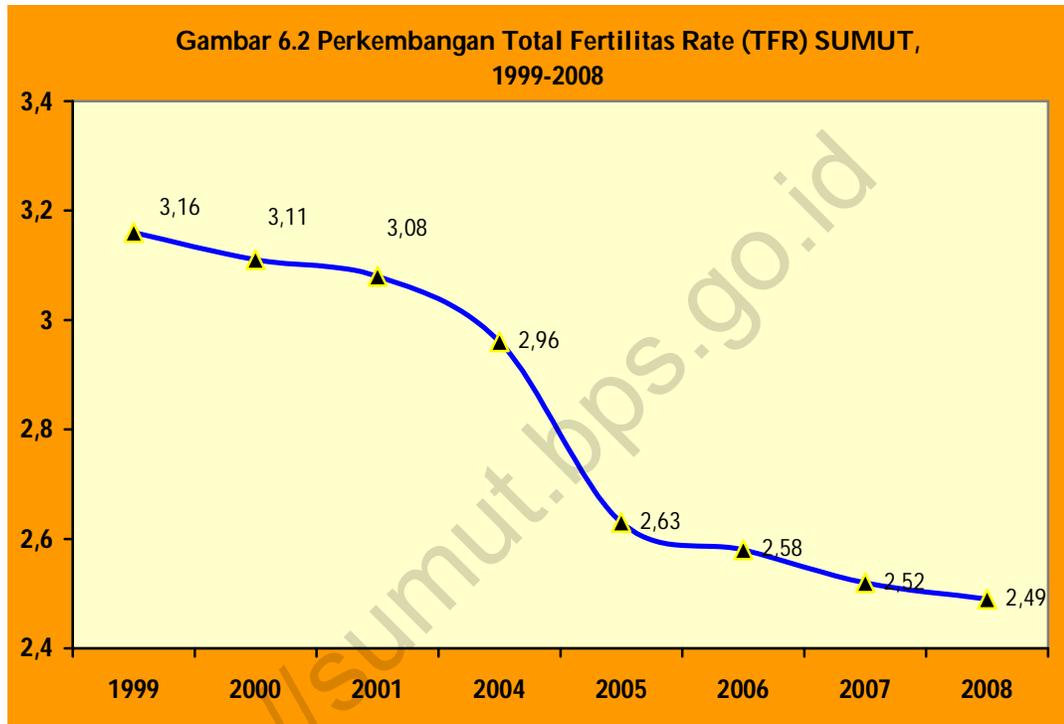
Grafik 6.1. Persentase Wanita Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2010



6.1. Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/ TFR*)

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan perubahan jumlah penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak

lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan akan membawa konsekuensi terhadap kesejahteraan rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.



Total Fertility Rate (TFR) Sumatera Utara pada tahun 1999 sebesar 3,16 kemudian turun menjadi 2,63 pada tahun 2005. Pada tahun 2008 turun kembali menjadi sebesar 2,49. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap tingginya tingkat kelahiran adalah usia perkawinan pertama terutama wanita, karena semakin muda seorang wanita menikah maka kemungkinan waktu untuk melahirkan semakin panjang. Selain itu usia perkawinan juga berpengaruh terhadap stabilitas suatu keluarga, terhadap kesehatan diri sendiri, dan terhadap anak yang dilahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum siapnya fisik dan mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan

pertama (*melebihi usia yang dianjurkan dalam program KB*), semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan

6.2. Keluarga Berencana

Penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatra Utara telah berlangsung cukup lama, namun yang menarik untuk dibahas adalah perubahan yang terjadi setelah dimulainya program keluarga berencana nasional. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB pada tahun 2010 sebesar 66,18 persen, dengan rincian 68,63 persen di perkotaan dan 63,78 persen di perdesaan. Persentase wanita yang pernah ikut KB di kabupaten/kota tersebut sangat bervariasi. Di Kota Binjai sudah cukup tinggi yakni 77,42 persen, sedangkan di Kabupaten Mandailing Natal sangat rendah, yaitu hanya sebesar 51,37 persen. Persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB sebesar 48,67 persen.

Tabel 6.2. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Status Penggunaan Alat/Cara KB, 2010

Kabupaten/Kota	Sedang Menggunakan	Tidak Menggunakan Lagi	Tdk Pernah Menggunakan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Nias	42,57	13,45	43,98	100,00
2. Mandailing Natal	25,21	16,16	58,62	100,00
3. Tapanuli Selatan	30,80	16,18	53,02	100,00
4. Tapanuli Tengah	33,39	18,59	48,02	100,00
5. Tapanuli Utara	36,88	17,28	45,84	100,00
6. Toba Samosir	40,93	16,28	42,79	100,00
7. Labuhan Batu	50,58	23,06	26,36	100,00
8. Asahan	52,77	20,44	26,79	100,00
9. Simalungun	52,80	16,43	30,76	100,00
10. Dairi	36,60	17,28	46,12	100,00
11. Karo	52,87	21,38	25,75	100,00
12. Deli Serdang	56,49	16,19	27,32	100,00
13. Langkat	61,72	16,47	21,81	100,00
14. Nias Selatan	40,34	12,47	47,19	100,00
15. Humb.Hasundutan	34,27	14,94	50,79	100,00
16. Pakphak Barat	33,81	18,14	48,04	100,00
17. Samosir	32,76	11,94	55,30	100,00
18. Serdang Bedagai	58,79	18,27	22,94	100,00
19. Batubara	52,08	22,95	24,97	100,00
20. Pd.Lawas Utara	30,71	21,57	47,72	100,00
21. Padang Lawas	24,74	18,83	56,43	100,00
22. Lab. Batu Selatan	55,31	16,25	28,44	100,00
23. Lab. Batu Utara	53,45	18,13	28,42	100,00
24. Nias Utara	42,13	9,51	48,36	100,00
25. Nias Barat	29,84	8,16	62,00	100,00
Kota				
71. Sibolga	47,01	20,38	32,61	100,00
72. Tanjung Balai	47,66	20,00	32,34	100,00
73. Pematang Siantar	49,87	16,89	33,25	100,00
74. Tebing Tinggi	54,48	23,02	22,51	100,00
75. Medan	45,60	16,51	37,89	100,00
76. Binjai	57,05	20,37	22,59	100,00
77. Padangsidempuan	45,79	20,64	33,57	100,00
78. Gunung Sitoli	30,54	13,00	56,46	100,00
Sumatera Utara	48,67	17,51	33,82	100,00
• Perkotaan	50,97	17,66	31,37	100,00
• Pedesaan	46,42	17,36	36,22	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut diantaranya menggunakan alat/cara suntik (47,362 persen), pil KB (32,56 persen) dan MOW (4,86 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai.

Tabel 6.3. Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB Yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2010

Kabupaten/Kota	MOW	MOP	IUD/ AKDR/ Spiral	Suntik	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom/In travag	Alat Modern Lainnya	Tradisio nal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1. Nias	2,38	0,00	4,76	67,84	11,91	7,15	0,00	0,00	5,95
2. Mandailing Natal	2,18	0,00	1,03	64,29	1,67	27,37	0,00	0,00	3,45
3. Tapanuli Selatan	0,00	0,33	2,44	58,48	15,65	22,12	0,17	0,00	0,81
4. Tapanuli Tengah	7,19	2,28	4,82	44,33	13,96	25,13	0,85	0,00	1,44
5. Tapanuli Utara	22,77	2,28	5,25	40,87	9,19	7,13	1,66	0,00	10,84
6. Toba Samosir	25,65	0,00	3,29	41,48	11,75	8,14	0,47	0,00	9,22
7. Labuhan Batu	0,40	0,40	0,87	44,69	3,12	43,81	0,87	0,00	5,84
8. Asahan	1,04	0,65	3,12	47,36	4,74	39,97	1,49	0,33	1,30
9. Simalungun	14,06	1,54	1,85	48,12	2,93	25,33	1,71	1,68	2,79
10. Dairi	7,66	0,43	0,99	52,73	18,73	9,51	2,84	0,00	7,10
11. Karo	8,04	2,55	2,10	55,67	8,63	19,40	0,91	0,00	2,69
12. Deli Serdang	5,46	2,94	2,32	40,92	4,92	39,62	0,99	0,00	2,84
13. Langkat	1,25	1,60	1,94	37,40	7,98	48,35	0,57	0,00	0,91
14. Nias Selatan	6,54	0,70	0,81	78,51	1,17	9,35	0,00	0,00	2,92
15. Humb.Hasundutan	18,83	3,83	6,92	45,66	12,49	9,01	1,35	0,00	1,92
16. Pakphak Barat	9,21	0,00	4,76	53,41	19,51	5,12	1,59	0,00	6,40
17. Samosir	6,01	2,62	10,38	44,98	14,91	12,46	2,27	3,40	2,97
18. Serdang Bedagai	3,10	1,04	4,05	47,71	2,50	39,61	0,73	0,00	1,27
19. Batubara	2,82	0,00	2,64	43,12	3,27	43,78	0,91	0,00	3,46
20. Pd.Lawas Utara	1,74	0,00	1,17	69,89	0,77	24,50	0,97	0,00	0,97
21. Padang Lawas	0,00	0,96	2,27	69,89	8,00	16,96	0,96	0,00	0,96
22. Lab. Batu Selatan	1,74	0,66	1,55	65,53	2,14	27,72	0,43	0,00	0,23
23. Lab. Batu Utara	1,01	0,00	0,00	54,94	2,94	33,84	1,01	0,00	6,25
24. Nias Utara	3,27	0,63	4,67	78,47	2,64	5,90	1,26	0,00	3,16
25. Nias Barat	0,00	0,00	3,13	58,59	23,44	10,94	0,00	0,00	3,91
Kota									
71. Sibolga	5,78	0,58	6,36	42,77	12,72	24,86	2,89	1,16	2,89
72. Tanjung Balai	2,23	0,45	1,79	40,63	4,46	41,07	1,79	0,45	7,14
73. Pematang Siantar	8,99	0,00	5,29	41,80	7,41	24,87	4,76	0,00	6,88
74. Tebing Tinggi	1,41	0,00	1,88	42,72	7,51	38,50	2,35	0,47	5,16
75. Medan	4,14	2,07	9,66	46,21	1,38	28,28	2,76	0,69	4,83
76. Binjai	4,19	0,85	6,78	40,14	6,31	37,49	1,27	0,85	2,12
77. Padangsidempuan	2,77	1,04	8,85	51,30	8,65	22,71	2,25	0,00	2,42
78. Gunung Sitoli	2,85	0,00	16,31	69,59	1,85	6,55	0,00	0,00	2,85
Sumatera Utara	4,86	1,47	3,79	47,36	5,13	32,56	1,35	0,29	3,19
• Perkotaan	4,52	1,74	5,18	43,90	4,13	34,31	1,84	0,35	4,03
• Pedesaan	5,23	1,17	2,29	51,09	6,19	30,69	0,82	0,23	2,30

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

BAB VII

KEMISKINAN, POLA KONSUMSI DAN IPM

7.1. Kemiskinan

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.

Kebutuhan minimal tersebut meliputi kebutuhan untuk makanan terutama energi kalori sehingga memungkinkan seseorang bisa bekerja untuk memperoleh pendapatan serta kebutuhan minimal non-makanan yang harus dipenuhi. Penentuan batas kemiskinan yang dilakukan oleh BPS mengacu pada kebutuhan minimal yang setara dengan kebutuhan energi sebesar 2.100 kilo kalori (kkal) per kapita per hari, ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan. Patokan 2.100 kilo kalori ditentukan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi yang menyatakan hidup sehat rata-rata setiap orang harus mengkonsumsi makanan minimal setara 2.100 kilo kalori perkapita perhari.

Berdasarkan hasil Susenas, persentase penduduk miskin di Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 1999 persentase penduduk miskin di Sumatera Utara sekitar 16,74 persen kemudian turun menjadi 15,89 persen, pada tahun 2003. Angka ini kembali turun menjadi 12,55 persen pada tahun 2008 dan 11,31 persen pada tahun 2010.



Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lainnya yang juga sangat penting untuk melihat kemiskinan di suatu daerah adalah kedalaman dan keparahan kemiskinannya. Kedalaman kemiskinan menggambarkan gap atau rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan variasi selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Berdasarkan data pada tabel 7.1. pada tahun 2010, indeks kedalaman kemiskinan di daerah perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Selain lebih dalam kemiskinan di perdesaan juga lebih parah, hal ini tergambar melalui indeks keparahan perdesaan yang juga lebih tinggi dibanding perkotaan.

Tabel 7.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) di Sumatera Utara, Maret 2010

Indeks	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1)	2,01	2,07	2,04
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2)	0,54	0,59	0,57

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2010

7.2. Pola Konsumsi

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

Tabel 7.2. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995-2010

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	32.003	66,76	15.932	33,24	47.935	100,00
1996	37.498	66,03	19.291	33,97	56.789	100,00
1997	38.987	65,54	20.499	34,46	59.486	100,00
1998	50.151	68,35	23.223	31,65	73.374	100,00
1999	86.804	72,78	32.465	27,22	119.269	100,00
2000	91.874	72,15	35.465	27,85	127.339	100,00
2001	102.089	70,46	42.809	29,54	144.898	100,00
2002	122.024	68,15	57.018	31,85	179.042	100,00
2003	134.681	67,85	198.497	32,15	198.497	100,00
2004	136.526	64,22	76.059	35,78	212.585	100,00
2005	168.655	60,20	121.933	39,80	287.480	100,00
2006	185.207	58,60	130.862	41,40	316.070	100,00
2007	204.914	60,20	135.473	39,80	340.387	100,00
2008	273.858	55,30	221.407	44,70	495.265	100,00
2009	280.155	56,87	212.476	43,13	492.631	100,00
2010	321.539	57,45	238.138	42,55	559.678	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Sumatera Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2010 sebesar Rp. 559.678,- yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp. 321.539,- dan untuk pengeluaran bukan makanan Rp. 238.138,-. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran diperuntukan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran rumahtangga di daerah perdesaan lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 65,87 persen untuk daerah perdesaan dan 50,01 persen untuk daerah perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah perdesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan relatif lebih baik dibanding di perdesaan.

Persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi di Kabupaten Nias (73,91 persen), disusul Kabupaten Tapanuli Selatan (69,28 persen). Sedangkan persentase terendah pengeluaran untuk makanan terjadi di Kota Medan (43,72 persen) dan Kota Pematang Siantar (54,78 persen).

Tabel 7.3. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota, 2009

Kabupaten/Kota	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	73,91	26,09	100,00
2. Mandailing Natal	68,80	31,20	100,00
3. Tapanuli Selatan	69,28	30,72	100,00
4. Tapanuli Tengah	65,65	34,35	100,00
5. Tapanuli Utara	62,40	37,60	100,00
6. Toba Samosir	60,95	39,05	100,00
7. Labuhan Batu	63,09	36,91	100,00
8. Asahan	61,02	38,98	100,00
9. Simalungun	61,99	38,01	100,00
10. Dairi	68,98	31,02	100,00
11. Karo	66,55	33,45	100,00
12. Deli Serdang	56,76	43,24	100,00
13. Langkat	64,39	35,61	100,00
14. Nias Selatan	69,93	30,07	100,00
15. Humb.Hasundutan	61,41	38,59	100,00
16. Pakphak Barat	68,27	31,73	100,00
17. Samosir	66,46	33,54	100,00
18. Serdang Bedagai	64,99	35,01	100,00
19. Batubara	64,44	35,56	100,00
20. Pd.Lawas Utara	68,70	31,30	100,00
21. Padang Lawas	66,18	33,82	100,00
22. Lab. Batu Selatan	65,52	34,48	100,00
23. Lab. Batu Utara	62,31	37,69	100,00
24. Nias Utara	68,81	31,19	100,00
25. Nias Barat	64,14	35,86	100,00
Kota			
71. Sibolga	55,73	44,27	100,00
72. Tanjung Balai	60,54	39,46	100,00
73. Pematang Siantar	54,78	45,22	100,00
74. Tebing Tinggi	55,48	44,52	100,00
75. Medan	43,72	56,28	100,00
76. Binjai	61,03	38,97	100,00
77. Padangsidempuan	57,85	42,15	100,00
78. Gunung Sitoli	56,74	43,26	100,00
Sumatera Utara	57,45	42,55	100,00
• Perkotaan	73,91	26,09	100,00
• Pedesaan	68,80	31,20	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

7.3. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia. Indeks ini dinilai mampu mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Konsep Pembangunan Manusia berbeda dengan pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Fakta menunjukkan bahwa banyak daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi cukup baik namun memiliki kualitas pembangunan manusia yang rendah. Hal ini mungkin terjadi karena tingkat pertumbuhan PDRB yang tinggi di suatu daerah tersebut belum tentu dinikmati langsung oleh masyarakatnya.

Untuk melihat perkembangan IPM di Kabupaten/Kota, maka tingkatan status pembangunan manusia dibedakan 4 (empat) kriteria yaitu tinggi, menengah atas, menengah bawah dan rendah. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendah, hal ini mengindikasikan kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalannya. Begitu juga jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, berarti pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan.

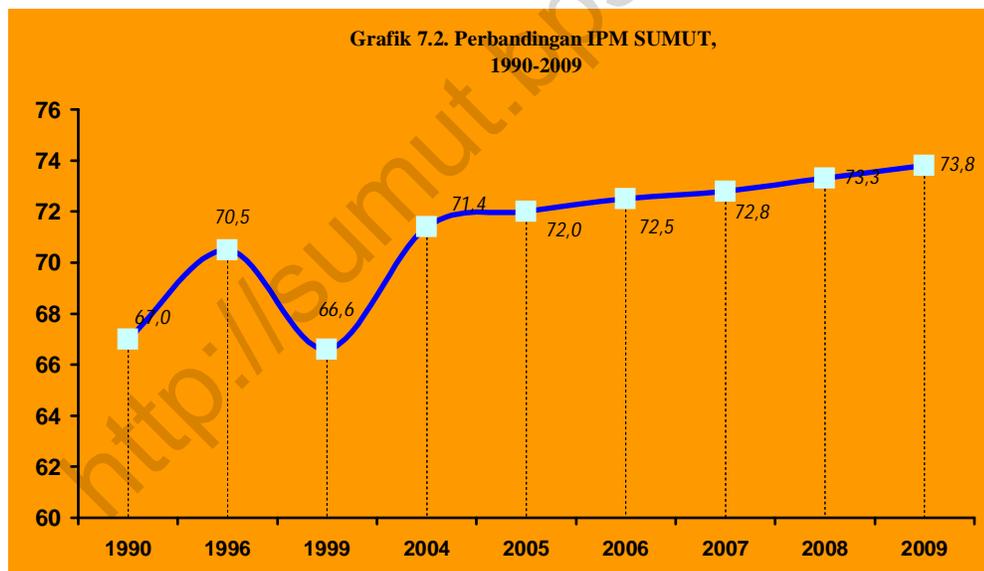
Tabel 7.4. Tingkatan Status dan Kriteria Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 50$
Menengah bawah	$50 \leq IPM < 66$
Menengah atas	$66 \leq IPM < 80$
Tinggi	$IPM \geq 80$

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia

Selama periode 1990-1996 kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara terus meningkat dan berada pada status menengah atas. Kondisi sebaliknya terjadi pada tahun 1999, dimana pengaruh krisis di segala sektor kehidupan telah mengakibatkan menurunnya kualitas manusia secara nasional dan termasuk Sumatera Utara. Pada tahun 1999 kualitas pembangunan manusia Provinsi Sumatera Utara mengalami kemunduran bahkan keterpurukan sehingga lebih buruk dibanding tahun 1996. Hal ini dapat terlihat dari nilai IPM Provinsi Sumatera Utara pada tahun 1999 hanya 66,6. Kondisi tersebut disebabkan daya beli masyarakat Sumatera Utara sebagai salah satu komponen IPM jatuh terpuruk.

Kualitas pembangunan manusia di Sumatera Utara mulai menunjukkan kondisi yang menunjukkan perbaikan sejak tahun 2004. Pada tahun 2004, IPM Sumatera Utara mencapai 71,4 dan pada tahun 2010 menjadi 74,19.



Pada tahun 2010 Seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, status pembangunan manusianya telah berada pada kualitas menengah. Kabupaten Nias merupakan daerah dengan IPM paling rendah dan sebaliknya, Kota Pematang Siantar dengan IPM sebesar 77,51 adalah yang tertinggi di Sumatera Utara.

Tabel 7.5. Tingkat dan Status Pembangunan Manusia Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2009-2010

Kabupaten/Kota (1)	2009			2010		
	IPM (2)	Status (3)	Rangk. (4)	IPM (5)	Status (6)	Rangk. (7)
Kabupaten						
1. Nias	68,26	MA	30	68,66	MA	30
2. Mandailing Natal	70,27	MA	29	70,60	MA	29
3. Tapanuli Selatan	73,64	MA	11	74,02	MA	11
4. Tapanuli Tengah	70,91	MA	27	71,21	MA	27
5. Tapanuli Utara	73,85	MA	10	74,31	MA	10
6. Toba Samosir	76,22	MA	3	76,55	MA	3
7. Labuhan Batu	73,61	MA	13	74,03	MA	13
8. Asahan	72,16	MA	21	72,54	MA	21
9. Simalungun	73,13	MA	16	73,50	MA	16
10. Dairi	72,38	MA	20	72,86	MA	20
11. Karo	74,84	MA	6	75,34	MA	6
12. Deli Serdang	74,67	MA	9	75,28	MA	9
13. Langkat	72,82	MA	19	73,18	MA	19
14. Nias Selatan	66,27	MA	32	67,15	MA	32
15. Humb.Hasundutan	71,64	MA	24	71,94	MA	24
16. Pakphak Barat	70,36	MA	28	70,80	MA	28
17. Samosir	73,42	MA	15	73,70	MA	15
18. Serdang Bedagai	72,94	MA	18	73,25	MA	18
19. Batubara	71,25	MA	26	71,62	MA	26
20. Pd.Lawas Utara	72,11	MA	22	72,52	MA	22
21. Padang Lawas	71,68	MA	23	71,98	MA	23
22. Lab. Batu Selatan	73,52	MA	14	73,84	MA	14
23. Lab. Batu Utara	73,10	MA	17	73,45	MA	17
24. Nias Utara	67,36	MA	31	67,75	MA	31
25. Nias Barat	65,96	MB	33	66,46	MA	33
Kota						
71. Sibolga	74,82	MA	7	75,08	MA	7
72. Tanjung Balai	73,64	MA	12	74,14	MA	12
73. Pematang Siantar	77,18	MA	1	77,51	MA	1
74. Tebing Tinggi	76,10	MA	4	76,49	MA	4
75. Medan	76,99	MA	2	77,36	MA	2
76. Binjai	76,09	MA	5	76,41	MA	5
77. Padangsidimpuan	74,77	MA	8	75,21	MA	8
78. Gunung Sitoli	71,33	MA	25	71,67	MA	25
Sumatera Utara	73,80	MA		74,19	MA	

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Keterangan : -) Tergabung Kabupaten Induk, MA : Menengah Atas, MB:Menengah Bawah

BAB VIII KETENAGAKERJAAN

Masalah ketenagakerjaan merupakan permasalahan dan isu yang kompleks serta terus berkembang, sehingga tidak hanya menjadi masalah daerah namun telah menjadi masalah nasional bahkan internasional. Masalah ketenagakerjaan harus membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak terkait, baik pemerintah, pengusaha, pekerja itu sendiri dan pihak lainnya. Saat ini pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja

Secara teori tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Dalam analisis tenaga kerja, bagian yang sangat penting mendapat perhatian adalah angkatan kerja. Angkatan kerja (***economically active***) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Mereka yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Pengangguran disini didefinisikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja dan saat sedang mencari kerja atau mempersiapkan usaha atau juga orang yang sudah merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (***uneconomically active***) adalah mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Utara diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka.

Selain pengangguran terbuka (*disguised unemployed*) dan pengangguran terselubung yaitu mereka yang bekerja kurang dari jam kerja normal (*under employed*) juga merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut banyak terjadi di Sumatera Utara yang antara lain sebagai konsekuensi dari masyarakat bercorak agraris dan lapangan pekerjaan yang sangat terbatas serta semakin banyak calon tenaga kerja baru baik yang berpendidikan maupun tidak.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*TPAK*), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

Tabel 8.1. Jumlah dan Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2008-2010

Kegiatan	2008		2009		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)		
Angkatan Kerja	6.094.802	68,33	6.298.070	69,14	6.617.377	69,51
- Bekerja	5.540.263	62,11	5.765.643	63,30	6.125.571	64,34
- Pengangguran	554.539	6,22	532.427	5,58	491.806	5,17
Bukan Angkatan Kerja	2.825.171	31,67	2.810.668	30,86	2.902.897	30,49
Jumlah	8.919.973	100,00	9.108.738	100,00	9.520.274	100,00
T P A K (%)	68,33		69,14		69,51	
TPT (%)	9,10		8,45		7,43	

Sumber : Sakernas Agustus 2008-2010

8.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Pada tahun 2010, jumlah penduduk usia kerja di Sumatera Utara adalah 9.520.274 orang yang terdiri dari 6.617.377 angkatan kerja dan sisanya sebanyak 2.902.897 orang termasuk bukan angkatan kerja. Selanjutnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mampu menggambarkan sejauh mana peran angkatan kerja disuatu daerah. Semakin tinggi nilai TPAK semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa TPAK di Sumatera Utara tahun 2010 sebesar 69,51 persen, artinya bahwa pada tahun 2010 sebanyak 69,51 persen penduduk usia kerja di Sumatera Utara siap terjun dalam pasar kerja baik itu bekerja atau mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus sebagai pengangguran.

Jika dilihat perkembangannya, tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumatera Utara menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2008, TPAK Sumatera Utara 68,33 persen, kemudian meningkat menjadi 69,14 persen tahun 2009 dan kembali naik pada tahun 2010 menjadi 69,51 persen. Kabupaten Samosir memiliki TPAK paling tinggi, dan mencapai 92,32 persen, dan sebaliknya, Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan yang terendah dengan TPAK sebesar 60,57 persen.

8.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2010 di Sumatera Utara sebesar 7,43 persen. Pada tahun 2009 sebesar 8,45 persen, dan tahun 2008 sebesar 9,10 persen. Kecenderungan menurunnya tingkat pengangguran terbuka ini tentunya sinyal positif bagi kesejahteraan di Sumatera Utara. Disadari bahwa, semakin tinggi pengangguran akan berakibat pada meningkatnya kerawanan sosial.

Hal yang cukup menarik jika mencermati TPT menurut kabupaten/kota, daerah perkotaan umumnya memiliki TPT relatif tinggi dan umumnya diatas 10 persen, sebaliknya di daerah kabupaten umumnya rendah. Hal ini dapat dipahami bahwa di kabupaten pada umumnya merupakan daerah pertanian, dan tidak sulit untuk bekerja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Berbeda di perkotaan dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi, penduduk usia kerja umumnya lebih selektif untuk mencari pekerjaan, selain karena sudah terbatasnya lahan pertanian.

Tabel 8.2 Jumlah Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan serta TPT dan TPAK, 2010

Kab/Kota	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja	Penduduk 15+	TPT	TPAK
	Bekerja	Pengangguran	Total				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten							
1. Nias	66.630	1.756	68.386	20.310	88.696	2,57	77,10
2. Mandailing Natal	194.922	8.571	203.493	81.916	285.409	4,21	71,30
3. Tapanuli Selatan	144.807	5.012	149.819	36.344	186.163	3,35	80,48
4. Tapanuli Tengah	147.865	9.843	157.708	56.703	214.411	6,24	73,55
5. Tapanuli Utara	161.081	3.720	164.801	31.012	195.813	2,26	84,16
6. Toba Samosir	96.356	2.533	98.889	23.523	122.412	2,56	80,78
7. Labuhan Batu	166.131	12.586	178.717	119.503	298.220	7,04	59,93
8. Asahan	282.915	27.687	310.602	179.393	489.995	8,91	63,39
9. Simalungun	395.676	27.181	422.857	182.855	605.712	6,43	69,81
10. Dairi	166.108	3.490	169.598	17.880	187.478	2,06	90,46
11. Karo	218.202	3.444	221.646	37.683	259.329	1,55	85,47
12. Deli Serdang	853.907	84.669	938.576	402.994	1.341.570	9,02	69,96
13. Langkat	445.850	42.424	488.274	232.294	720.568	8,69	67,76
14. Nias Selatan	160.246	3.986	164.232	34.619	198.851	2,43	82,59
15. Humb.Hasundutan	104.750	723	105.473	11.811	117.284	0,69	89,93
16. Pakphak Barat	24.278	364	24.642	2.931	27.573	1,48	89,37
17. Samosir	76.899	424	77.323	6.434	83.757	0,55	92,32
18. Serdang Bedagai	283.291	19.109	302.400	138.153	440.553	6,32	68,64
19. Batubara	161.890	13.988	175.878	96.875	272.753	7,95	64,48
20. Pd.Lawas Utara	118.011	4.076	122.087	30.760	152.847	3,34	79,88
21. Padang Lawas	104.003	7.893	111.896	41.901	153.797	7,05	72,76
22. Lab. Batu Selatan	119.271	6.940	126.211	71.626	197.837	5,50	63,80
23. Lab. Batu Utara	135.977	8.599	144.576	94.101	238.677	5,95	60,57
24. Nias Utara	54.410	1.853	56.263	18.718	74.981	3,29	75,04
25. Nias Barat	37.537	222	37.759	9.931	47.690	0,59	79,18
Kota							
71. Sibolga	35.894	7.616	43.510	18.295	61.805	17,50	70,40
72. Tanjung Balai	56.311	6.433	62.744	33.573	96.317	10,25	65,14
73. Pematang Siantar	101.051	11.729	112.780	67.510	180.290	10,40	62,55
74. Tebing Tinggi	65.751	6.935	72.686	37.810	110.496	9,54	65,78
75. Medan	886.815	133.811	1.020.626	627.008	1.647.634	13,11	61,94
76. Binjai	108.513	14.300	122.813	66.125	188.938	11,64	65,00
77. Padangsidempuan	87.880	8.250	96.130	46.563	142.693	8,58	67,37
78. Gunung Sitoli	62.343	1.639	63.982	25.743	89.725	2,56	71,31
Sumatera Utara	6.125.571	491.806	6.617.377	2.902.897	9.520.274	7,43	69,51

Sumber : Sakernas Agustus 2010

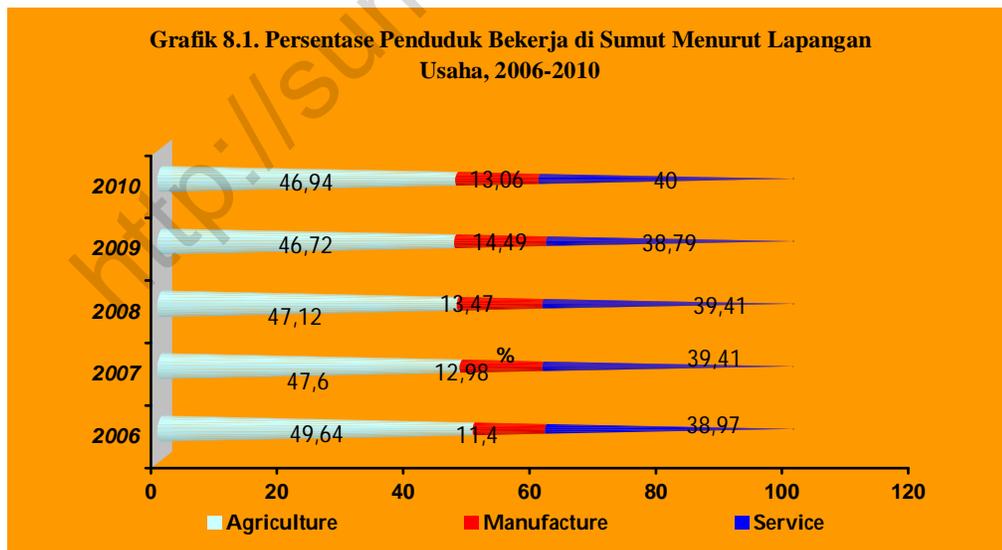
8.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

8.3.1. Lapangan Pekerjaan Dan Jenis Pekerjaan

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang sangat dominan bagi perekonomian maupun penyerapan tenaga kerja di Sumatera Utara. Perkembangan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2006 sebanyak 49,64 persen penduduk Sumatera Utara bekerja di sektor **Agriculture**/pertanian, kemudian disusul sektor **Service** (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) sebesar 38,97 persen dan sisanya 11,4 persen pada sektor **Manufacture** (Pertambangan/penggalian, Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan) seperti yang terlihat pada grafik 8.1.

Pada tahun 2010 kondisinya relatif sama, dimana pertanian masih mendominasi walaupun menunjukkan sedikit penurunan yaitu 46,94 persen, disusul sektor **Service** sebesar 40,00 persen serta sektor **Manufacture** sebesar 13,06 persen.

Besarnya peran sektor Pertanian dalam perekonomian Sumatera Utara disebabkan daerah ini memang merupakan potensi sektor pertanian, seperti pertanian tanam pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan subur.



Pada tabel 8.3 menunjukkan bahwa pertanian mendominasi lapangan pekerjaan di seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Deli Serdang yang didominasi sektor **service**. Demikian juga untuk daerah perkotaan dimana sektor **service** sangat dominan utamanya perdagangan dan jasa.

Tabel 8.3 Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha, 2010

Kabupaten/Kota	Lapangan Usaha			Total
	Agriculture	Manufacture	Service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten				
1. Nias	84,69	2,21	13,10	100,00
2. Mandailing Natal	67,52	7,14	25,34	100,00
3. Tapanuli Selatan	81,60	4,21	14,18	100,00
4. Tapanuli Tengah	61,84	7,41	30,75	100,00
5. Tapanuli Utara	74,35	5,07	20,57	100,00
6. Toba Samosir	70,83	5,92	23,25	100,00
7. Labuhan Batu	57,48	10,53	31,98	100,00
8. Asahan	47,41	15,61	36,98	100,00
9. Simalungun	57,34	10,22	32,44	100,00
10. Dairi	79,51	1,92	18,57	100,00
11. Karo	72,98	2,74	24,28	100,00
12. Deli Serdang	25,65	28,33	46,02	100,00
13. Langkat	49,00	13,08	37,91	100,00
14. Nias Selatan	86,21	3,40	10,40	100,00
15. Humb.Hasundutan	83,54	3,86	12,60	100,00
16. Pakphak Barat	81,18	1,20	17,62	100,00
17. Samosir	78,48	3,50	18,02	100,00
18. Serdang Bedagai	54,84	12,17	32,98	100,00
19. Batubara	49,00	12,99	38,01	100,00
20. Pd.Lawas Utara	84,39	1,87	13,74	100,00
21. Padang Lawas	73,97	2,74	23,29	100,00
22. Lab. Batu Selatan	71,24	1,53	27,23	100,00
23. Lab. Batu Utara	68,31	3,72	27,97	100,00
24. Nias Utara	86,23	2,26	11,51	100,00
25. Nias Barat	89,10	2,02	8,88	100,00
Kota				
71. Sibolga	16,53	8,90	74,57	100,00
72. Tanjung Balai	21,99	7,48	70,54	100,00
73. Pematang Siantar	8,63	13,50	77,87	100,00
74. Tebing Tinggi	4,73	18,52	76,75	100,00
75. Medan	3,07	20,55	76,37	100,00
76. Binjai	9,40	28,31	62,29	100,00
77. Padangsidempuan	22,38	10,71	66,91	100,00
78. Gunung Sitoli	67,34	7,22	25,44	100,00
Sumatera Utara	46,94	13,06	40,00	100,00

Sumber : Sakernas Agustus 2010

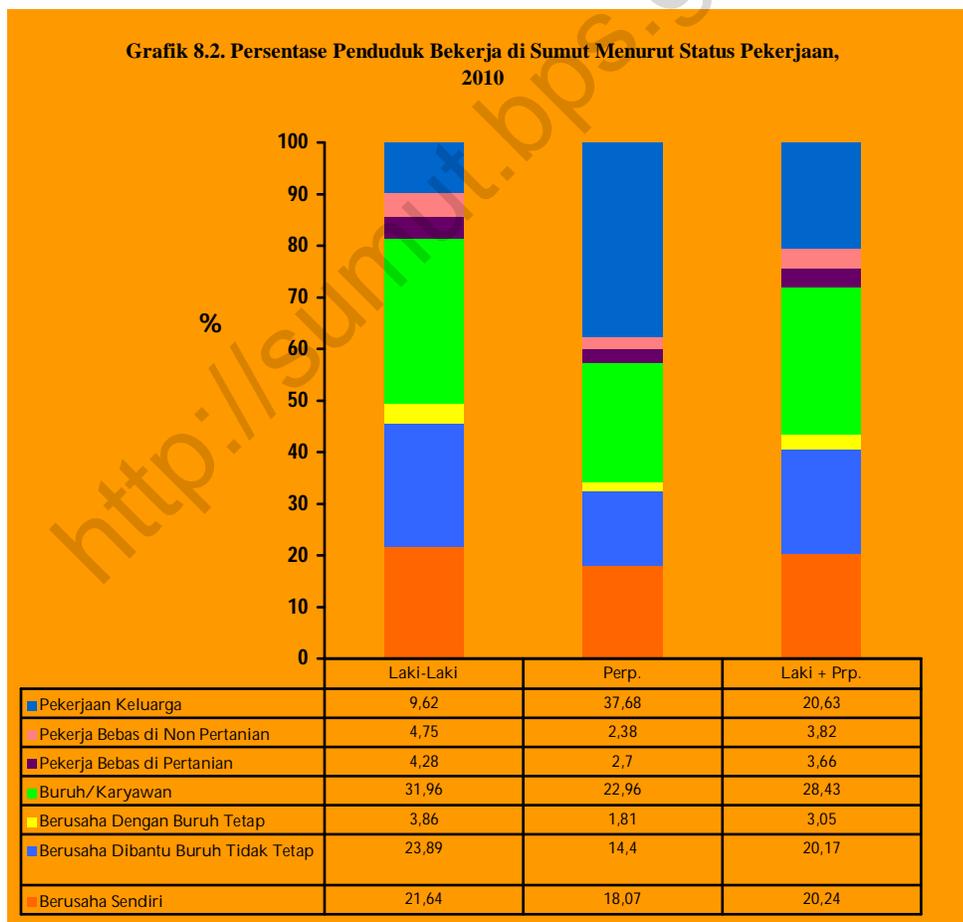
8.3.2. Status Pekerjaan

Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 (tujuh) macam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini

bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan tersebut.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif *'tradisional'*. Sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern, lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama dikalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

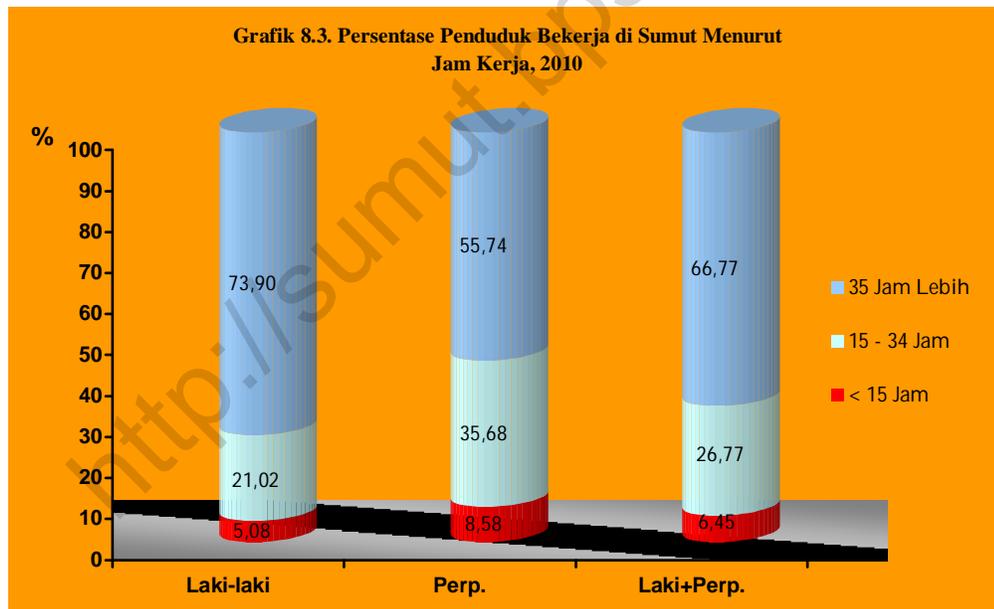
Pada umumnya penduduk Sumatera Utara yang bekerja sebagai buruh/karyawan. Pada tahun 2010 sebanyak 28,43 persen pekerja di Sumatera Utara berstatus buruh/karyawan, kemudian disusul pekerja keluarga 20,63 persen dan 20,124 persen berusaha sendiri.



8.3.3. Jam Kerja Seminggu

Jam kerja normal (35 jam seminggu atau lebih) masih dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja penuh atau pekerja paruh waktu. Seorang pekerja dikatakan sebagai bekerja penuh (**full employed**) bila jam kerjanya mencapai 35 jam kerja atau lebih dalam seminggu. Sebaliknya dikatakan bekerja tidak penuh bila jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Pada tahun 2010 pekerja di Sumatera Utara yang mempunyai jam kerja normal sudah relatif tinggi, yaitu sebesar 66,77 persen. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, persentasenya sangat berbeda yaitu laki-laki 73,90 persen dan perempuan 55,74 persen. Sebaliknya untuk rata-rata jam kerja satu minggu dibawah jam kerja normal didominasi oleh perempuan. Hal ini sangat dimaklumi karena umumnya perempuan lebih memilih bekerja paruh waktu.



BAB IX PERUMAHAN

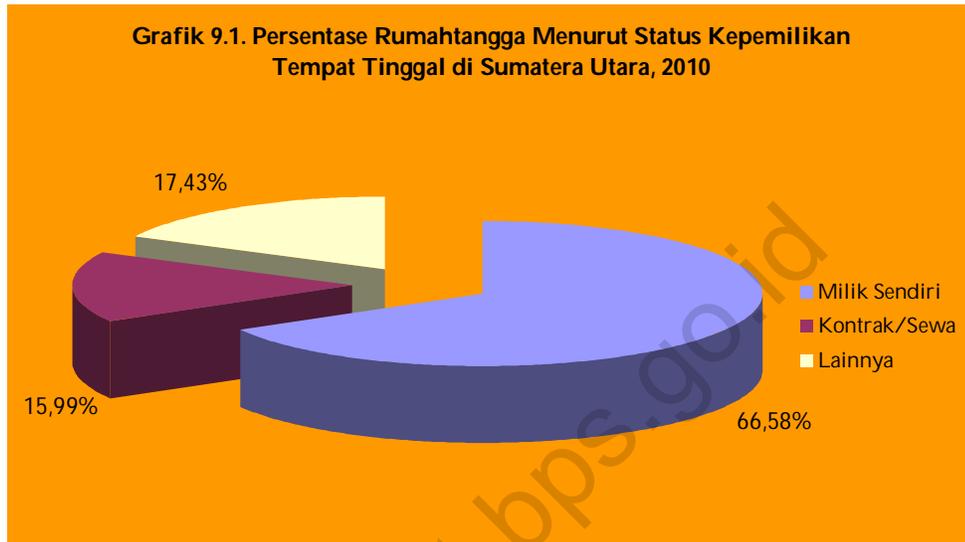
Salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang dan pangan adalah papan (perumahan). Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Tingginya harga rumah akibat permintaan yang terus meningkat, dan tingkat pendapatan penduduk Indonesia yang relatif rendah, menyebabkan banyak rumahtangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Oleh sebab itu, perumahan merupakan salah satu persoalan utama yang masih memerlukan penanganan cukup serius, baik mengenai kelengkapan sarana perumahan maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya. Rumah yang layak sebaiknya mampu memenuhi syarat kesehatan bagi penghuninya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan status kelayakan sebuah rumah diantaranya adalah luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumahtangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, program kesehatan lingkungan yang bertujuan menjaga, membentuk/mencapai dan melestarikan keadaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman juga dilakukan. Hal ini disadari bahwa perumahan tidak hanya sekedar tempat berteduh tetapi merupakan cermin kehidupan masyarakat, sehingga perlu terwujudnya rumah sehat yang dapat memberikan rasa nyaman dan nikmat bagi penghuninya.

9.1. Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumahtangga terhadap rumah yang ditempatinya.



Sekitar dua per tiga rumahtangga yang ada di Sumatera Utara (66,58 %) mendiami rumah milik sendiri, dan sebanyak 15,99 persen rumahtangga masih menyewa/mengontrak, sedangkan sisanya (17,43 %) mendiami rumah dinas/bebas sewa/rumah orang tua/famili dan lainnya. Persentase rumahtangga yang menyewa/mengontrak masih cukup besar sehingga perlu mendapat perhatian. Mereka yang masih menyewa/mengontrak adalah rumahtangga baru atau mereka yang belum mampu memiliki rumah sendiri karena keterbatasan pendapatannya.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap (asbes/seng/genteng). Ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumahtangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraaannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraaannya.

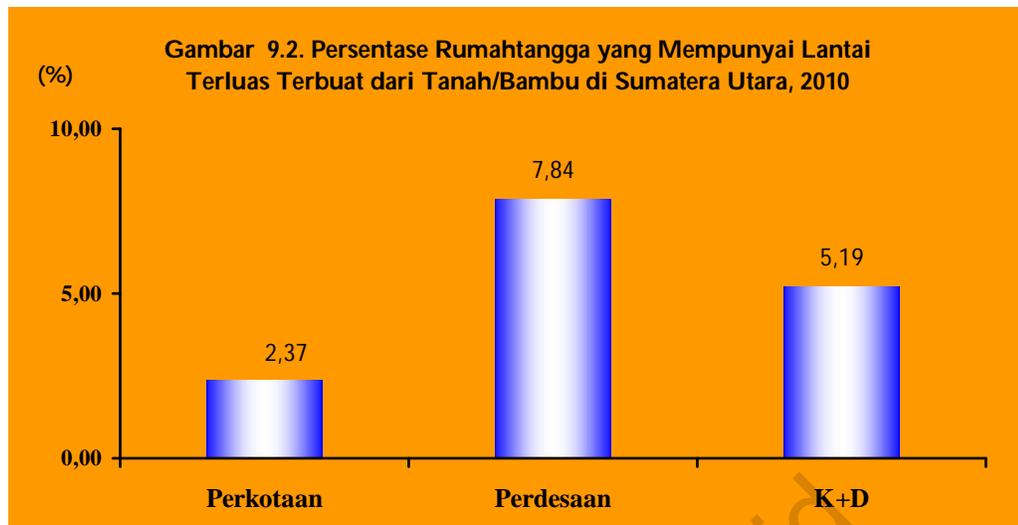
Tabel. 9.1. Kondisi Perumahan Sumatera Utara, 2004-2009

Uraian	2006	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Rata-rata luas lantai perkapita (M ²)	15,75	18,58	18,61
2. Rumahtangga dengan lantai bukan tanah (%)	93,39	95,09	94,81
3. Rumahtangga dengan dinding rumah Tembok (%)	45,70	50,98	54,34
4. Rumahtangga dengan atap beton, genteng, sirap dan seng (%)	90,06	92,39	90,97

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Sumatera Utara menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai perkapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumahtangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumahtangga. Pada tahun 2010 rata-rata rumahtangga di Sumatera Utara memiliki luas lantai per kapita sekitar 18,61 M². Angka ini sudah lebih tinggi dibanding tahun 2006 yang sebesar 15,75 M².

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada grafik 9.2. diketahui bahwa sekitar 5,19 persen rumahtangga di Provinsi Sumatera Utara masih tinggal di rumah dengan lantai tanah/bambu. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah perdesaan, sebab masih 7,84 persen rumahtangga tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat.



Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2010, sekitar 54,34 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan dinding tembok. Selain tembok bahan lain yang cukup dominan adalah kayu yakni sekitar 40,39 persen. Hampir seluruhnya atau sekitar 91 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap seng, beton dan genteng.

9.2. Fasilitas Rumah

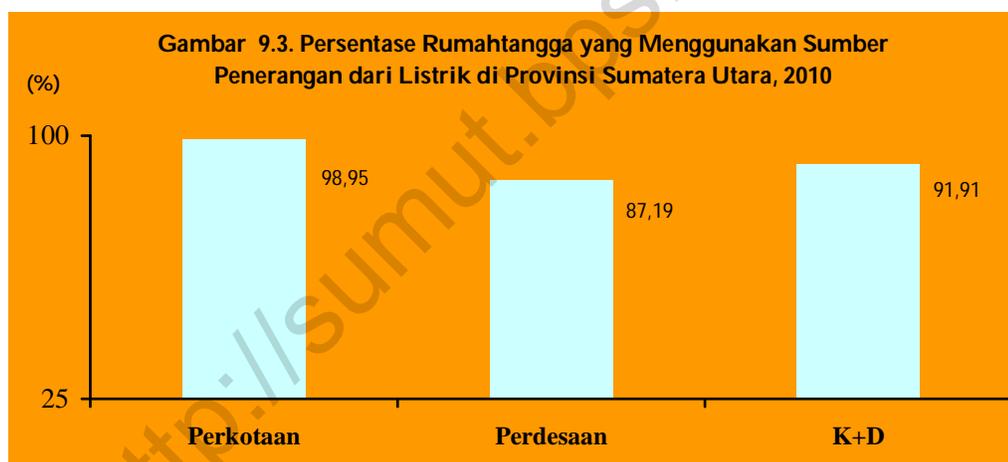
Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama diantaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat. Pada tahun 2010 sebanyak 91,91 persen rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN dan ini lebih tinggi dibanding tahun 2004 yang sebesar 88 persen

Tabel 9.2. Kondisi Fasilitas Rumah di Sumatera Utara, 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Persentase rumahtangga dengan sumber penerangan listrik (%)	92,58	93,11	92,91
2. Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri (%)	65,63	63,73	67,23
3. Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	72,76	73,07	74,11

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Jika dilihat menurut daerahnya, penggunaan sumber penerangan berasal dari listrik di daerah perkotaan lebih tinggi (98,95 persen) dibandingkan di daerah perdesaan (87,19 persen).



Selanjutnya dari aspek sumber air minum, dapat dikatakan kondisinya masih jauh dari ideal. Hal ini ditunjukkan, hanya sekitar 67,23 persen rumahtangga di Sumatera Utara yang memiliki fasilitas air minum sendiri, sedangkan sisanya menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama bahkan tidak memiliki. Selain fasilitas kelayakan rumah dari aspek air minum dapat dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian disusul dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemar relatif cukup besar.

Tabel 9.3. Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum, di Provinsi Sumatera Utara, 2010

Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Air Kemasan	29,36	4,31	16,48
2. Ledeng	33,00	6,39	19,32
3. Pompa	13,36	21,68	17,64
4. Sumur terlindungi	18,64	23,32	21,05
5. Sumur tdk terlindungi	2,88	10,97	7,04
6. Mata Air tidak terlindungi	1,63	14,88	8,44
7. Mata Air terlindungi	0,32	7,62	4,07
8. Air Sungai/hujan	0,69	9,71	5,32
9. Lainnya	0,12	1,13	0,64

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Sebagian besar rumah tangga di Sumatera Utara menggunakan sumber air minum dari sumur terlindung yaitu mencapai 21,05 persen, ledeng 19,32 persen. Di daerah perdesaan, penggunaan sumber air dari ledeng dan air kemasan lebih sedikit (10,70 persen) dibandingkan daerah perkotaan (62,36 persen). Sebaliknya, sumber air minum dari mata air, untuk daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini wajar karena pada sebagian daerah pedesaan banyak sumber mata air, dan tidak/belum tersedianya fasilitas air ledeng.

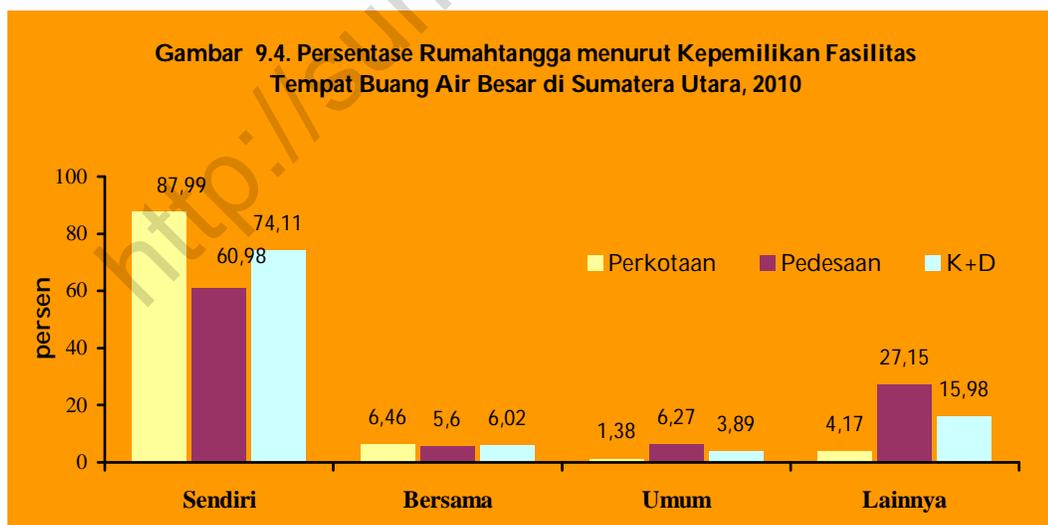
Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumahtangga di daerah perkotaan yaitu sebesar 84,57 persen, sedangkan di perdesaan hanya 45,42 persen. Selain itu didaerah perdesaan masih terdapat sekitar 33,18 persen tempat penampungan di tempat lain dan 20,21 persen di sungai/danau/laut.

Tabel 9.4. Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Utara, 2010

Tempat penampungan kotoran/tinja	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tangki	84,57	45,42	64,45
2. Kolam/sawah	0,45	1,19	0,83
3. Sungai/Danau/Laut	5,89	20,21	13,25
4. Lainnya	9,09	33,18	21,47
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional Juli 2010

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumahtangga di Sumatera Utara sudah mempunyai fasilitas sendiri (74,11 persen). Di daerah perkotaan, rumahtangga yang mempunyai fasilitas buang air besar sendiri jauh lebih besar yaitu mencapai 87,99 persen dibandingkan daerah perdesaan yang hanya 60,98 persen.



BAB XI

ANALISIS DATA PENGANGGURAN

SEMESTER I 2011

Pengangguran merupakan isu paling penting dalam ketenagakerjaan. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Dari sisi ekonomi, pengangguran merupakan produk dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya pengangguran, dalam bab ini secara khusus dianalisis tingkat pengangguran semester I tahun 2011 yang bersumber dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Februari 2011. Untuk lebih memperkaya informasi mengenai kondisi ketenagakerjaan terkini juga ditampilkan beberapa indikator penting seperti : penduduk usia kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), tingkat pengangguran terbuka (TPT), jumlah setengah penganggur, status pekerjaan, dan lapangan pekerjaan utama.

Penduduk usia kerja di Sumatera Utara pada Februari tahun 2011 menurun dari 9.228.149 orang pada Februari 2010 menjadi 8.723.071 orang pada Februari 2011. Penurunan penduduk usia kerja ini juga diikuti dengan menurunnya jumlah angkatan kerja. Pada Februari 2011, sekitar 73,53 persen dari seluruh penduduk usia kerja merupakan tenaga kerja aktif dalam kegiatan ekonomi (angkatan kerja) yang besarnya mencapai 6.413.952 orang.

Tabel 10.1. Komposisi Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas menurut Kegiatan Utama, Februari, Agustus 2010 dan Februari 2011

Kegiatan Utama	Satuan	2010		2011
		Februari	Agustus	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penduduk 15 tahun ke atas	Orang	9.228.149	9.520.274	8.723.071
2. Angkatan Kerja	Orang	6.402.891	6.617.377	6.413.952
a. Bekerja	Orang	5.890.066	6.125.571	5.953.336
b. Penganggur	Orang	512.825	491.806	460.616
3. Bukan Angkatan Kerja	Orang	2.285.258	2.902.897	2.309.119
a. Sekolah	Orang	924.681	897.902	767.008
b. Mengurus Rumah Tangga	Orang	1.459.186	1.538.639	1.177.200
c. Lainnya	Orang	441.391	466.356	364.911

Sumber : Sakernas Februari, Agustus 2010 dan Februari 2011

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, untuk melihat besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu perekonomian dipakai ukuran yaitu TPAK. Dalam kurun waktu satu tahun terakhir (Februari 2010– Februari 2011) TPAK Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 4,15 persen, yaitu dari 69,38 persen pada Februari 2010 menjadi 73,53 persen pada Februari 2011.

Dilihat wilayah tempat tinggalnya TPAK di perdesaan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan. Pada Februari 2011 TPAK daerah perkotaan sebesar 69,23 persen atau lebih rendah dari TPAK daerah perdesaan sebesar 77,69 persen. Hal ini disebabkan di daerah perdesaan pada umumnya didominasi lapangan pekerjaan pertanian sehingga mereka yang mempunyai kegiatan utama mengurus rumahtangga dan sekolah juga bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja keluarga dan otomatis mereka ini tergolong sebagai angkatan kerja. Selanjutnya dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki yang sebesar 84,88 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan sebesar 62,53 persen. Hal ini disebabkan besarnya persentase penduduk perempuan yang mengurus rumahtangga, sementara penduduk laki-laki umumnya sebagai pencari nafkah utama di dalam keluarga.

Tabel 10.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Utara menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2010-2011

Wilayah/ Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	
	2010	2011
(1)	(2)	(3)
1. Wilayah		
- Perkotaan	65,65	69,23
- Perdesaan	72,52	77,69
- Perkotaan + Perdesaan	69,38	73,53
2. Jenis Kelamin		
- Laki-laki	82,53	84,88
- Perempuan	56,59	62,53
- Laki-laki + Perempuan	69,38	73,53

Sumber : Sakernas Februari 2010 dan Februari 10

Selanjutnya seperti telah disampaikan diatas bahwa isu terpenting dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Pada dasarnya pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak mendapatkan kesempatan bekerja dengan berbagai sebab. Konsep penganggur yang digunakan oleh BPS adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum memulai bekerja dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (*jobless*). Penganggur dengan konsep/defenisi tersebut biasanya disebut pengangguran terbuka.

Pada Februari 2011, jumlah penganggur terbuka di Sumatera Utara sebesar 460.616 orang. Angka ini lebih rendah dibandingkan keadaan Februari 2010 atau mengalami penurunan sebesar 52.209 orang. Indikator yang digunakan untuk melihat tingkat pengangguran ini adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT), dimana TPT merupakan persentase jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2011 sebesar 7,18 persen, mengalami penurunan sebesar 0,83 persen dibanding TPT pada Februari 2009 yang besarnya 8,01 persen.

Jika dibandingkan antar wilayah perkotaan dan perdesaan, TPT di perkotaan yaitu sebesar 11,18 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT daerah perdesaan yang sebesar 3,73 persen pada Februari 2011. Rendahnya TPT di perdesaan dibanding perkotaan disebabkan lapangan pekerjaan pertanian di perdesaan lebih terbuka untuk menampung angkatan kerja, walaupun hanya sebagai pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Kemudian jika dianalisis menurut perspektif jender, TPT perempuan sebesar 9,64 persen atau lebih tinggi dibandingkan TPT laki-laki sebesar 5,32 persen.

Jika dibandingkan dengan Februari 2010, TPT Sumatera Utara pada Februari 2011 mengalami penurunan, baik dilihat dari wilayah tempat tinggal dan jenis kelamin.

Tabel 10.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Februari 2010-2011

Wilayah Tempat Tinggal/ Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
	2010	2011
(1)	(2)	(3)
1. Wilayah		
- Perkotaan	11,33	11,18
- Perdesaan	5,49	3,73
- Perkotaan + Perdesaan	8,01	7,18
2. Jenis Kelamin		
- Laki-laki	6,29	5,32
- Perempuan	10,46	9,64
- Laki-laki + Perempuan	8,01	7,18

Sumber : Sakernas Februari 2010 dan Februari 2011

Selain TPT, ukuran pengangguran lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tingkat produktivitas pekerja adalah angka setengah pengangguran. Rendahnya produktivitas pekerja dapat disebabkan oleh pekerja sendiri maupun pekerjaan yang kurang memadai. Dalam kurun waktu satu tahun (Februari 2010-Februari 2011) di Sumatera Utara, jumlah setengah penganggur berada pada kisaran 1,84 juta orang hingga 1,98 juta orang. Mereka adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu).

Tabel 10.4. Jumlah Setengah Penganggur Provinsi Sumatera Utara menurut Jenis Penganggur, Februari 2010-2011

Kegiatan Utama	Satuan	Tahun	
		2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekerja tidak penuh	Orang	1,842,206	1,982,436
a. Setengah pengangguran	Orang	805,379	731,292
b. Paruh waktu	Orang	1,036,827	1,251,144

Sumber : Sakernas Februari 2010 dan Februari 2011

Jumlah pekerja tidak penuh pada Februari 2010 sebesar 1.842.206 orang dan meningkat menjadi 1.982.436 orang pada Februari. Dari jumlah tersebut sekitar 36,89 persen atau 731.292 orang merupakan setengah penganggur, yaitu mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih mau menerima pekerjaan. Sedangkan jumlah pekerja paruh waktu (mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain) pada Februari 2011 sebesar 1.251.144 orang. Dibandingkan dengan Februari 2010, jumlahnya meningkat sebesar 214.317 orang.

Informasi penting lainnya yang dapat diperoleh dari Sakernas Februari 2011 adalah distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan. Pada Februari 2009 maupun Februari 2010, persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian mencapai 47 persen. Pada Februari 2011 meningkat menjadi 50,90 persen penduduk bekerja di sektor pertanian. Sektor lainnya yang cukup banyak dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan jasa.

Tabel 10.5. Persentase Penduduk Sumatera Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2010 dan 2011

Lapangan Pekerjaan Utama	Tahun	
	2010	2011
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	47,52	50,90
2. Industri	9,00	6,07
3. Konstruksi	3,94	3,16
4. Perdagangan	20,64	17,62
5. Transportasi, Komunikasi	5,27	5,40
6. Keuangan	1,26	1,29
7. Jasa Kemasyarakatan	11,89	14,65
8. Lainnya *)	0,48	0,90
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2010 dan Februari 2011

*) Lapangan Pekerjaan Utama/Sektor Lainnya terdiri dari : Sektor Pertambangan, Listrik, Gas dan Air.

Dilihat menurut status pekerjaan, pada tahun 2011 paling banyak bekerja sebagai buruh/karyawan baik pemerintah maupun swasta, yaitu 29,30 persen. Pekerja keluarga 24,77 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 21,57 persen dan yang paling sedikit adalah berusaha dengan buruh tetap sebesar 3,61 persen.

Pola status pekerjaan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2011 berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga (38,60 persen) dan buruh/karyawan (21,45 persen). Sedangkan untuk penduduk laki-laki sebagian besar sebagai buruh/karyawan (35,01 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 26,70 persen.

Tabel 10.6. Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Provinsi Sumatera Utara menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Februari 2011

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki laki + Perempuan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Berusaha Sendiri	14,36	15,80	14,96
2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	26,70	14,51	21,57
3. Berusaha Dengan Buruh Tetap	4,80	1,96	3,61
4. Buruh/Karyawan	35,01	21,45	29,30
5. Pekerja Bebas di Pertanian	4,06	1,63	3,04
6. Pekerja Bebas di Non Pertanian	3,75	1,36	2,75
7. Pekerjaan Keluarga	11,32	43,29	24,77
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Sakernas Februari 2011

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA